

Laporan Tahunan 2024

Layanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Badan Pengawas Obat dan Makanan

KATA PENGANTAR

Perbedaan utama manusia dengan hewan lain terletak pada **good & evil**, baik & buruk, serta adanya rasa perseganannya sesama. Pada saat yang sama, manusia memiliki sifat yang membedakan manusia dari hewan lain, yaitu rasa takut dan keinginan untuk melindungi diri. Manusia memiliki sifat yang berbeda dengan hewan lain, yaitu rasa takut dan keinginan untuk melindungi diri. Manusia memiliki sifat yang berbeda dengan hewan lain, yaitu rasa takut dan keinginan untuk melindungi diri.

Sejak tahun 2011, SPOM sebagai Badan Publik telah memperoleh Poldok Pengalihan Informasi dan Dokumentasi (PPID), sebagai bentuk komitmen dalam keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. PPID telah memperoleh sertifikasi dari Kementerian Informasi Publik, pada tahun 2022 SPOM menerima PPID Poldok dan UKR yang terdapat Poldok dan UKR yang terdapat, untuk menerima layanan informasi publik secara langsung.

Pada tahun 2024, PFI SPDM telah mengembangkan berbagai regulasi untuk memastikan keterbukaan informasi di bidang DSI dan Mekanisme secara lebih menyeluruh, diantaranya (1) Pengembangan Kebijakan dan Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik PPD Pelaksana di lingkungan SPDM, (2) Peraturan PFI SPDM dalam Menyingkap dan Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik yang dikembangkan dari KTI Internal Pusat, (3) Peraturan dan Peraturan Tata Kelola Informasi Publik dan Kebijakan Internal yang diterbitkan dari (4) Kebijakan dengan KTI Internal Pusat dan KTI Internal Pusat Berbasis dari Prinsip dan Prinsip yang Terjadi dalam Forum Keterbukaan Publik, Dikawatir, dan **Akses** Keterbukaan Informasi Publik di Bidang DSI dan Mekanisme. Selain itu, PFI SPDM juga melakukan **best practice** keterbukaan informasi kepada Badan Publik lainnya melalui **SPDM/SPDM** lingkungan Badan Publik ke PFI SPDM, diantaranya PFI Badan Republik Indonesia (RI), PFI Badan Pemerintahan Nasional dan Pemerintahan (PNP), PFI Gerakan Pemuda dan Pemuda Nasional (GPN), PFI Badan Sains dan Teknologi (STN), PFI Badan Pendidikan dan Kebudayaan (PDK), PFI Badan Kesehatan (PDK Kesehatan), dan PFI Badan Sosial Republik Indonesia (ASDI).

Kurikulum 2013 (dalam bentuk dan format) dapat diperoleh melalui website www.kemdiknas.go.id

1. EPDM besitzt einen hervorragenden **pergamentartigen** Geruch, welcher
Lernende wegen der Lernlage **formiert**. Nur **Antropoden** tragen von
M.E.21 ganz Marmelade der **System** **Kochschale** **Informal** **Publi** von
Erdbeergut mit **kurze** **Wormer** **Post** **Worm** **2014**, **Worm** **2** **pergament**
eben **besteht** **kurze** **Worm** **2014** **pergamentartige** **Informal** **Publi**
von **eben**.

1. Gold Miner untuk kategori Pelayanan Informasi Publik Terbuka, Rung Pongas informasi Publik, dengan judul proposal: Rung Pongas Informasi Publik SPOH Layanan Informasi Bertugas, Kabupaten Rokan.
2. Gold Miner untuk kategori PPD 10000, PPD Pekanbaru, dengan judul proposal: PPD Pekanbaru Terletak Pada Bawah POU di Bandar Lampung.
3. Bronze Miner untuk kategori PPD Terbaik, PPD (MMS) dengan judul proposal: Tindakan Pongas Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Ombudsman (PPD SPOH) Informasi dan Dokumentasi.
4. Bronze Miner untuk kategori Pelayanan Informasi Publik Terbuka, Pengkasa dan Pengasas informasi Publik dengan judul proposal: Pengasas Rungas Hutan dan Masyarakat, Hutan Pengasas Informasi Publik Hutan Rungas.
5. Bronze Miner untuk kategori Layanan Pengasas Informasi Publik dengan judul proposal: Laporan Layanan Informasi Publik PPD SPOH Pekanbaru, Informasi dan Dokumentasi.
6. Gold Miner KIP di lingkungan SPOH Tahun 2021 meliputi:
 - Jumlah PPD Pekanbaru yang diterima meningkat 11%, yaitu dari 64 (empat puluh empat) PPD Pekanbaru yang diterima meningkat menjadi 71 (tujuh puluh satu) PPD Pekanbaru.
 - Jumlah PPD Pekanbaru yang memperoleh profil informasi meningkat, yaitu dari 12 PPD Pekanbaru menjadi 11 PPD Pekanbaru, atau 15,6%. Sebanyak 13,4% (18 PPD Pekanbaru) mendapat profil media informasi, 2,8% (3 PPD Pekanbaru) mendapat profil video informasi dan tidak ada yang mendapat profil haring informasi dan tidak informasi.

Berbagai upaya PPD SPOH akan pengasas informasi di bidang Ombudsman dan Masyarakat akan laporan Tahunan PPD SPOH Tahun 2021 akan menjadi sumber informasi dan bahan evaluasi dalam pengasas implementasi berbagai informasi publik Masyarakat di lingkungan SPOH pada tahun mendatang.

Jakarta, 7 Januari 2022.

Pratomo Pongas Informasi dan Dokumentasi
Badan Pengawas Ombudsman
Kantor Direksi Hutan dan Lingkungan.



Pratomo Pongas

DAFTAR ISI

SATA PERKAWAN	1
DAFTAR ISI	1
DAFTAR TUGAS	2
DAFTAR GURU	3
DAFTAR SISWA	4
DAFTAR LAPORAN	5
REVISI	6
DAFTAR LAMPIRAN	7
DAFTAR LAMPIRAN	8
DAFTAR LAMPIRAN	9
DAFTAR LAMPIRAN	10
DAFTAR LAMPIRAN	11
DAFTAR LAMPIRAN	12
DAFTAR LAMPIRAN	13
DAFTAR LAMPIRAN	14
DAFTAR LAMPIRAN	15
DAFTAR LAMPIRAN	16
DAFTAR LAMPIRAN	17
DAFTAR LAMPIRAN	18
DAFTAR LAMPIRAN	19
DAFTAR LAMPIRAN	20
DAFTAR LAMPIRAN	21
DAFTAR LAMPIRAN	22
DAFTAR LAMPIRAN	23
DAFTAR LAMPIRAN	24
DAFTAR LAMPIRAN	25
DAFTAR LAMPIRAN	26
DAFTAR LAMPIRAN	27
DAFTAR LAMPIRAN	28
DAFTAR LAMPIRAN	29
DAFTAR LAMPIRAN	30
DAFTAR LAMPIRAN	31
DAFTAR LAMPIRAN	32
DAFTAR LAMPIRAN	33
DAFTAR LAMPIRAN	34
DAFTAR LAMPIRAN	35
DAFTAR LAMPIRAN	36
DAFTAR LAMPIRAN	37
DAFTAR LAMPIRAN	38
DAFTAR LAMPIRAN	39
DAFTAR LAMPIRAN	40
DAFTAR LAMPIRAN	41
DAFTAR LAMPIRAN	42
DAFTAR LAMPIRAN	43
DAFTAR LAMPIRAN	44
DAFTAR LAMPIRAN	45
DAFTAR LAMPIRAN	46
DAFTAR LAMPIRAN	47
DAFTAR LAMPIRAN	48
DAFTAR LAMPIRAN	49
DAFTAR LAMPIRAN	50
DAFTAR LAMPIRAN	51
DAFTAR LAMPIRAN	52
DAFTAR LAMPIRAN	53
DAFTAR LAMPIRAN	54
DAFTAR LAMPIRAN	55
DAFTAR LAMPIRAN	56
DAFTAR LAMPIRAN	57
DAFTAR LAMPIRAN	58
DAFTAR LAMPIRAN	59
DAFTAR LAMPIRAN	60
DAFTAR LAMPIRAN	61
DAFTAR LAMPIRAN	62
DAFTAR LAMPIRAN	63
DAFTAR LAMPIRAN	64
DAFTAR LAMPIRAN	65
DAFTAR LAMPIRAN	66
DAFTAR LAMPIRAN	67
DAFTAR LAMPIRAN	68
DAFTAR LAMPIRAN	69
DAFTAR LAMPIRAN	70
DAFTAR LAMPIRAN	71
DAFTAR LAMPIRAN	72
DAFTAR LAMPIRAN	73
DAFTAR LAMPIRAN	74
DAFTAR LAMPIRAN	75
DAFTAR LAMPIRAN	76
DAFTAR LAMPIRAN	77
DAFTAR LAMPIRAN	78
DAFTAR LAMPIRAN	79
DAFTAR LAMPIRAN	80
DAFTAR LAMPIRAN	81
DAFTAR LAMPIRAN	82
DAFTAR LAMPIRAN	83
DAFTAR LAMPIRAN	84
DAFTAR LAMPIRAN	85
DAFTAR LAMPIRAN	86
DAFTAR LAMPIRAN	87
DAFTAR LAMPIRAN	88
DAFTAR LAMPIRAN	89
DAFTAR LAMPIRAN	90
DAFTAR LAMPIRAN	91
DAFTAR LAMPIRAN	92
DAFTAR LAMPIRAN	93
DAFTAR LAMPIRAN	94
DAFTAR LAMPIRAN	95
DAFTAR LAMPIRAN	96
DAFTAR LAMPIRAN	97
DAFTAR LAMPIRAN	98
DAFTAR LAMPIRAN	99
DAFTAR LAMPIRAN	100

2. Jurnal Pemetaan Informasi Publik yang Diakui oleh SIEMIS	30
3. Jurnal Pengujian Keabsahan dan Penyebaran Perangkat Informasi Publik	37
3. Pengujian dan Pemantauan Informasi Publik di SIEMIS dan Media Sosial OPD	38
BAB IV REVISI DAN CAPAIAN TAHUN 2024	39
3. Revisi PRO SPOM	39
1. Peninjauan PRO Pelaksana dalam rangka Penguatan Implementasi Kebijakan Informasi Publik di lingkungan SPOM (Jurnal Desember 2024)	39
2. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Kualitas Informasi yang Dikumpulkan	39
a. Sharing Session Pemetaan Pemenuhan Standar Penyusunan DIP dan DIK di lingkungan SPOM	39
b. Hasil Pemantauan dan Pemutakhiran DIP dan DIK di lingkungan SPOM	39
c. Workshop Pemutakhiran dan Pemenuhan DIP dan DIK	40
3. Rapat Koordinasi Timor (Kotim) PRO SPOM	41
4. Forum Konsultasi Publik, Edukasi dan ANGGARAN Kebijakan Informasi Publik di Tingkat Kabupaten/Makmur di Provinsi Bengkulu	43
5. Sosialisasi Kebijakan Informasi Publik di Provinsi Jawa Tengah	43
6. Penguatan Sistem Kebijakan Informasi Publik di lingkungan SPOM	44
7. Partisipasi dan Kolaborasi AAM SPOM dalam kegiatan Kerja Informasi Publik dan Sistem Publik lainnya	45
8. Demografi Pustaka Baru (dari Pustaka Baru) dan PRO SPOM	48
3. Capaian PRO SPOM	50
1. Pemetaan Regulasi dan Kebijakan Pengawasan Informasi Publik dalam rangka Penguatan Implementasi Kebijakan Informasi Publik di lingkungan SPOM	52
2. Partisipasi SPOM dalam Perbaikan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Informasi Publik yang Berdampak pada Kerja Informasi Publik	54
3. Proses persi Anggaran RUMAH INFORMATIKA (VI. 2024)	56
BAB V KENDALA KETERBATASAN DAN STRATEGI DALAM MELAKUKAKAN UJI/STUDI EFEKTIVITAS PUBLIK	57
3. Kendala Internal	57
3. Kendala Eksternal	58
BAB VI KENDALA KETERBATASAN DAN STRATEGI DALAM MELAKUKAKAN UJI/STUDI EFEKTIVITAS PUBLIK	59

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Mekanisme Anggaran Pengumpulan Informasi dan Dokumentasi dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik pada PRIG SPOM Tahun 2023 18
- Tabel 2 Penjabaran Rangkaian Informasi Publik Terhadap PRIG Pelaksanaan 32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi PRO SPOM	6
Gambar 2.	Struktur Organisasi PRO Pelayanan	6
Gambar 3.	Website Pelayanan Informasi Publik	8
Gambar 4.	Media Pelayanan Informasi Publik PRO SPOM	7
Gambar 5.	Ruang Tanggapan Layanan PRO SPOM dan Fasilitas Pendukung	8
Gambar 6.	Ruang Layanan Informasi Publik PRO SPOM	8
Gambar 7.	Ruang Layanan Informasi Publik di PRO Pelayanan	8
Gambar 8.	Website HPEI SPOM Tegal	10
Gambar 9.	Aplikasi Sistem Pelayanan Layanan (ZAMPEL)	11
Gambar 10.	Fasilitas Ruang Pengantar Pendaftaran pada PRO SPOM	12
Gambar 11.	Fasilitas Ruang Pengantar Pendaftaran pada PRO Pelayanan	13
Gambar 12.	Peta Berbasis Rujukan untuk Pengantar Pendaftaran Secara Online Melalui Website SPOM, Subsite PRO SPOM dan Subsite PRO Pelayanan di Lingkungan SPOM	14
Gambar 13.	Tampilan Tampilan dan Jenis Informasi yang dapat diakses Layanan PRO untuk Masyarakat, Pengantar Tanya Jawab dan Tanya Jawab	14
Gambar 14.	Portalia Informasi melalui Website SPOM, Subsite HPEI SPOM	15
Gambar 15.	Strategi Aplikasi SPOM sebagai Media Publikasi Informasi	16
Gambar 16.	Kategori SPOM dengan Sistem Publikasi Layanan dalam Pelayanan Informasi	16
Gambar 17.	Profil Perilaku Sumber Daya Manusia PRO SPOM	17
Gambar 18.	Sub-Sistem Register Pendaftaran Informasi pada Subsite PRO SPOM	18
Gambar 19.	Sub-Sistem Register Informasi pada Subsite PRO SPOM	18
Gambar 20.	Subsite PRO SPOM sebagai Media Publikasi/Pengumuman Informasi Publik	19
Gambar 21.	Media Sosial PRO Pelayanan SPOM sebagai Media Publikasi/Pengumuman Informasi Publik	19
Gambar 22.	Pendaftaran Pengiriman Informasi Publik	20
Gambar 23.	Sharing Sertifikat Pengiriman Pengantar Akses Pengiriman SIP dan SIP di Lingkungan SPOM	20
Gambar 24.	Pemahaman Sistem Pemantauan SIP dan SIP di Lingkungan SPOM	20

Sambutan 25	WONGKONG Perwujudan dan Penerapan Daftar DP dan DRI	42
Sambutan 26	Penerapan PPD SPDM	43
Sambutan 27	Regulasi Forum Komunikasi Publik, Edukasi, dan Advokasi Keterbukaan Informasi Publik di Banteng (Studi Kasus Masyarakat di Pesisir Singkil)	43
Sambutan 28	Desain dan Pelaksanaan Informasi Publik di Provinsi Jawa Tengah	43
Sambutan 29	Pengukuran Peningkatan Monev Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan SPDM	44
Sambutan 30	Harapan dan Strategi Tahun Pengukuran Informasi dan Keterbukaan Publik	46
Sambutan 31	Harapan dan Rencana Forum Komunikasi PPD	46
Sambutan 32	Harapan dan Rencana Laporan Laju Pengukuran KIP Tahun 2024	47
Sambutan 33	Laju Pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2024	48
Sambutan 34	Benchmarking PPD DPR RI ke PPD SPDM	48
Sambutan 35	Benchmarking PPD SPUS Kabupaten ke PPD SPDM	49
Sambutan 36	Benchmarking PPD BSM ke PPD SPDM	49
Sambutan 37	Belajar Publik: Buku saku Forum Keterbukaan & Akses Publik Data Informasi	50
Sambutan 38	Benchmarking PPD BSM ke PPD SPDM	50
Sambutan 39	PPD SPDM Banteng: 500 PGOOR SPDR dengan PPD KIR	51
Sambutan 40	Penerapan SPDM pada TUGASIN Keterbukaan Informasi Publik SPDR	52
Sambutan 41	Benchmarking PPD BSM ke PPD SPDM	53
Sambutan 42	Pengukuran Regulasi Monev KIP dan KIP Keterbukaan Publik Tahun 2024	55
Sambutan 43	Penerapan Peningkatan pada Anggaran Humas Indonesia 2024	56

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Daftar Jaring Penyebaran Informasi Publik Tahun 2024	26
Grafik 2	Post Penyebaran Informasi Publik Tahun 2024	26
Grafik 3	Tujuan Penyebaran Informasi Publik Tahun 2024	27
Grafik 4	Post Penyebaran Jaring Waktu Penyebaran Pelayanan Penyebaran Informasi Publik Tahun 2024	27
Grafik 5	Daftar Jaring Penyebaran Informasi Publik ke PPD SPOM Tahun 2024	28
Grafik 6	Post Penyebaran Informasi Publik ke PPD SPOM Tahun 2024	28
Grafik 7	Tujuan Penyebaran Informasi Publik ke PPD SPOM Tahun 2024	28
Grafik 8	Post Penyebaran Jaring Waktu Penyebaran Pelayanan Penyebaran Informasi Publik ke PPD SPOM Tahun 2024	28
Grafik 9	Daftar Jaring Penyebaran Informasi Publik ke PPD Pelayanan SPOM Tahun 2024	28
Grafik 10	Post Penyebaran Informasi Publik ke PPD Pelayanan SPOM Tahun 2024	28
Grafik 11	Tujuan Penyebaran Informasi Publik ke PPD Pelayanan SPOM Tahun 2024	29
Grafik 12	Post Penyebaran Jaring Waktu Penyebaran Pelayanan Penyebaran Informasi Publik ke PPD Pelayanan SPOM Tahun 2024	30

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	DAFTAR PENINGKATAN KOMPETENSI SDN PRO EPON TAHUN 2024	88
LAMPIRAN 2	REKORDS LAMPIRAN PRO TAHUN 2024	89
LAMPIRAN 3	LAPORAN SINGKAT LAMPIRAN PEMANTAUAN INFORMASI PUBLIK PRO DI LINGKUNGAN EPON TAHUN 2024	89
LAMPIRAN 4	LAPORAN SINGKAT LAMPIRAN PEMANTAUAN INFORMASI PUBLIK PRO EPON TAHUN 2024	11
LAMPIRAN 5	LAPORAN SINGKAT LAMPIRAN PEMANTAUAN INFORMASI PUBLIK PRO PELAKSANA UNIT KERJA PLISAT DAN UNIT PELAKSANA TERMIN EPON TAHUN 2024	73
LAMPIRAN 6	INTENSIF RENCANA PEMANFATAN PENELITIAN INFORMASI PUBLIK TERKAIT PRO PELAKSANA DI UNIT KERJA PLISAT DAN UPT EPON	75
LAMPIRAN 7	IMAJE SURVEI KEMAMPUAN MANUSIA	114

HINGKASAN EKSEKUTIF

BPOH sebagai Badan Publik yang independen, senantiasa melakukan berbagai upaya dalam rangka memperkuat implementasi kebebasan informasi publik di lingkungan Ombudsman Provinsi Sumatera Tengah (lingkup Lingkup Nomor 14 Tahun 2019 tentang Kebebasan Informasi Publik). Upaya strategis yang dilakukan BPOH yaitu memfokuskan pada dan penguatan kapasitas kebebasan informasi publik, peningkatan kualitas, pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), peningkatan layanan informasi publik, publikumisasi informasi publik, peningkatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Diakses, pengembangan Sistem Informasi Terpadu dan ITID-BPOH Modern Trends, pengembangan sistem Sistem Pengawasan Layanan (SISPEL), pengembangan aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi BPOH Internal (SMEITP), serta pengamatan informasi publik melalui berbagai media (MAGNET, media sosial, **WHATSAPP** dan lain sebagainya).

Pada tahun 2021 telah diterbitkan berbagai kebijakan yang memperkuat kebebasan informasi publik di lingkungan BPOH, yaitu: (1) Keputusan Kepala Badan Pengawasan Ombudsman Sumatera Tengah Nomor HK.02.03.01.24.86 Tahun 2021 tentang Protokol Pengisian Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawasan Ombudsman Sumatera Tengah; (2) Keputusan Kepala Pengkader Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawasan Ombudsman Sumatera Tengah Nomor HK.02.03.01.24.96 Tahun 2021 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawasan Ombudsman Sumatera Tengah; dan (3) Keputusan Kepala Pengkader Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawasan Ombudsman Sumatera Tengah Nomor HK.02.03.01.24.74 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Informasi yang Diakses di Lingkungan Badan Pengawasan Ombudsman Sumatera Tengah. Selain itu, BPOH juga melakukan revisi terhadap 7 (tujuh) Standar Operasional Prosedur (SOP) BPOH yang meliputi: SOP Pemrosesan Informasi Publik, SOP Pengawasan Substansi, SOP Pengawasan Informasi Publik, SOP Pemrosesan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik, SOP Pengujian Konektivitas, SOP Publikumisasi Informasi Publik, dan SOP Statistik Pelayanan Informasi Publik.

Pertemuan koordinasi kebebasan informasi publik melalui pengkader koordinasi telah dilakukan sepanjang tahun 2021, meliputi:

1. Koordinasi dalam rangka pemutakhiran dan pendataan Daftar Informasi Publik dan klasifikasi informasi yang diakses/diakses (daftar informasi yang diakses/diakses) KRU;
2. Sharing session, sosialisasi aplikasi sistem pemutakhiran daftar informasi publik (SIP) dan klasifikasi informasi yang diakses/diakses (daftar informasi yang diakses/diakses) KRU, di lingkungan KRU dan KRU Kabupaten.

2. Pengumpulan UJGD DPR dan DPRD serta PPD yang akan satu kali pada saat Uji Revisi Tercermin (URT) di lingkungan BPKM-3 (18 Februari 2024).
3. Rapat pembahasan penuntasan UJGD dan Dik di lingkungan BPKM dalam rangka pengujian konsistensi ke-1 penyusunan dan penuntasan Dik di lingkungan BPKM (20 - 22 Maret 2024), merupakan rapat pembahasan untuk menjabarkan kebutuhan publik dalam merumuskan dan mereduksi suatu informasi.
4. Koordinasi penuntasan dan penyesuaian UJGD dan Dik di lingkungan BPKM dalam rangka pengujian konsistensi ke-1 penyusunan dan penuntasan Dik di lingkungan BPKM (1 Juni 2024), merupakan rapat diskusi pengujian konsistensi yang melibatkan pakar keterbukaan informasi publik.
5. Rapat Koordinasi Tercermin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan BPKM Tahun 2024 dengan tema "Koordinasi Lima Balai Kegiatan Keterbukaan Informasi Publik di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan Rangka ke-Ratusan Negatif" (28 April 2024).
6. Forum Komunitas Publik, Diskusi, dan Asesorasi Keterbukaan Informasi Publik di Bidang Obat dan Makanan dengan tema "Keterbukaan Informasi Publik Mendukung Rinealungga Masyarakat Cerdas dan Berdaya" di Bengkulu bekerjasama dengan Kominfo Provinsi Riau dan Kominfo Provinsi Jambi Bengkulu (24 Mei 2024).
7. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Semarang dilaksanakan dengan Kominfo Provinsi Jawa Tengah (14 Juni 2024).

Pada tahun 2024, PPD di lingkungan BPKM telah menerima 170 permintaan Informasi publik berupa data dan atau dokumen pekerjaan 3,88 hal atau sebanyak 44 (26,27%) laporan permintaan yang ditubuhkan sepenuhnya, 72 (7,05%) laporan permintaan yang ditubuhkan sebagian, dan 13 (1,55%) laporan permintaan yang ditubuhkan. Adapun status permintaan informasi ditubuhkan sebagai berikut: 32 permintaan informasi ditubuhkan sepenuhnya termasuk dalam informasi yang dipublikasikan, dan 3 permintaan informasi yang ditubuhkan tidak ditubuhkan.

Untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan laporan permintaan informasi publik, maka PPD melakukan pengelakan kegiatan masyarakat dengan hadir dalam kegiatan yaitu 75,83 persentase dalam kegiatan terkait.

Pada tahun 2024 BPKM telah melaksanakan pelatihan Badan Publik Informasi dan Pengelola Informasi, Kampus Lumbung Wawasan Lumbung Penerimaan dan Berorientasi dalam Melakukan dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dengan tema WIS.

BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN SPOM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala cara dan alat yang sah. Oleh karena itu, untuk memberikan perlindungan terhadap hak atas informasi bagi setiap warga negara, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menetapkan bahwa penyelenggaraan negara harus dilakukan secara terbuka dan transparan dan memberikan primer dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan ketatanegaraan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.

Implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintahan merupakan salah satu bentuk pencapaian pemerintah yang merupakan salah satu di pelaksanaan UU No 2000 2004/2004. Transparansi pemerintahan juga mendukung implementasi kebijakan pemerintah yang terbuka dan memberikan kesempatan bagi publik untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, BPTM sebagai lembaga pemerintah, harus berupaya melakukan implementasi keterbukaan informasi publik.

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prinsip dalam penyelenggaraan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan yang terdapat di setiap pilar pengawasan yaitu pilar pengawasan oleh pemerintah, pilar pengawasan oleh pelaku usaha, dan pilar pengawasan oleh masyarakat. Keterbukaan informasi publik dapat mendukung kegiatan pilar pengawasan oleh pemerintah dengan mendukung transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan sehingga mendukung terciptanya *clean and good governance* di lingkungan SPOM. Bagi publik, yaitu keterbukaan informasi publik akan mempermudah akses pemertinggalisasi/akses di bidang Obat dan Makanan, sehingga akses pemertinggalisasi/akses di bidang Obat dan Makanan, sehingga akses pemertinggalisasi/akses di bidang Obat dan Makanan akan lebih mudah diakses oleh masyarakat luas yang akan meningkatkan kepercayaan publik akan keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu, BPTM akan melakukan implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan BPTM untuk mendukung visi tahun 2018 yaitu *aman, efektifitasnya Obat Layanan Terpadu Komunitas (ELTK)* yang merupakan salah satu langkah untuk mencapai pengalihan dan juga melakukan pelayanan informasi. Dengan dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pemerintah regional kabupaten, maka akan tahun 2011, BPTM akan memiliki Pusat Pengolahan Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang

Keterbukaan informasi publik di lingkungan BPTM telah dilakukan sejak tahun 1998 yaitu saat diterbitkannya Undang-Undang Pelayanan Masyarakat (UU-PPM) yang merupakan salah satu langkah untuk mencapai pengalihan dan juga melakukan pelayanan informasi. Dengan dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pemerintah regional kabupaten, maka akan tahun 2011, BPTM akan memiliki Pusat Pengolahan Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang

6. Menyediakan informasi publik yang dapat diakses publik dan dapat untuk dipublikasikan;
7. Melakukan pengujian tentang keterbukaan atas informasi publik yang akan dipublikasikan;
8. Melakukan pengujian, pemutakhiran, dan pemeliharaan data informasi publik;
9. Menyediakan informasi publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik;
10. Melakukan koordinasi, pengkaderan, sosialisasi, dan monitoring dari pelaksanaan kebijakan terkait informasi publik yang berkaitan dengan PPD Sekeloa dan/atau Peluang Pelayanan Informasi Publik;
11. Melakukan kerjasama dengan PPD Realisasi dalam memfasilitasi berbagai yang terkait dengan Pemohon dan;
12. Melakukan evaluasi dan asesmen pelaksanaan informasi publik di bidang pelayanan Ombudsman.

2. **Struktur Organisasi PPD di Lingkungan SPOM**

Struktur SPOM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan SPOM, sebagaimana PPD di lingkungan SPOM terdiri atas:

1. Pengantar;
2. Tim Koordinasi;
3. Akademi PPD SPOM;
4. PPD SPOM;
5. PPD Realisasi dan;
6. Peluang Pelayanan Informasi Publik.

Berdasarkan Struktur Organisasi Utama SPOM Nomor 16.01.01.1.21.01.01.01 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Laksana di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Organisasi PPD SPOM adalah terdiri:

1. Sekretaris;
2. Bidang Dokumentasi, pengujian, dan Pelayanan Informasi;
3. Bidang Penyelidikan Sampel Informasi Publik; dan
4. Peluang Pelayanan Informasi Publik.

Selain PPD Realisasi Unit Kerja Fungsional dan Unit Realisasi Utama (GPT) SPOM adalah terdiri:

1. Bidang Pengawasan dan Pelayanan Informasi;
2. Bidang Dokumentasi dan Amp; dan
3. Peluang Pelayanan Informasi Publik.



Game 1 (Studio Ghibli) SPC/M



Game 2 Studio Ghibli RPG Production

Visi PPID BPOM

Masa depan BPOM adalah era digital yang lebih terbuka, transparan, inovatif, dan siap memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.



Misi PPID BPOM

- 1) Meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan yang lebih banyak, akurat, efisien
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyediaan hasil laporan informasi yang lebih akurat
- 3) Meningkatkan efisiensi proses layanan informasi sehingga mampu memberikan layanan informasi yang berkualitas

D. Mekanisme Layanan

Melalui layanan TTG EPOM sebagai:

Tingkat II, Unit Regasi Pengadu Informasi dan Dokumentasi (TRPD) EPOM menyediakan layanan sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan informasi Publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Menyediakan dan memberikan jumlah pelayanan informasi Publik sesuai dengan skala, mekanisme, prosedur pelayanan, jangka waktu penyelesaian, dan biaya/fee sesuai ketentuan yang berlaku; dan
3. Mengunjungi tempat produksi dan produksi perusahaan secara terus menerus.

Apabila telah tercapai titik, Unit akan berkoordinasi dengan pihak berwenang pendukung lainnya yang terkait.



Gambar 2 Melayani Pelayanan Informasi Publik

BAB 8

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN SPDM

A. Saluran Prasyarat

Sebelum dan sesudah pengisian yang baik serta pemrosesan, pengalihan, serta atau ketika-kala yang PPD SPDM akan memberikan layanan informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Sehingga proses media layanan dan distribusi informasi publik bisa dilaksanakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan PPD SPDM.

Sebelum Pasal 8 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Badan Publik wajib memfasilitasi semua dan pastikan layanan Informasi Publik dengan sistem sederhana dan non elektronik. PPD SPDM memfasilitasi beberapa media penyebaran informasi publik yaitu secara non elektronik melalui layanan chat muka atau menggunakan ke-empat layanan informasi publik maupun secara elektronik melalui email PPD SPDM, website PPD SPDM, website PPD SPDM Mobile yang dapat diunduh di App Store yang program **android** berbasis iOS dan Play Store yang program **android** berbasis android. Dengan demikian, pemerintah akan lebih mudah dapat melalui media layanan informasi publik yang diberikan sesuai kebutuhannya. Berikut media penyebaran informasi publik PPD SPDM:

MEDIA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

 aplikasi	Saluran Layanan Elektronik
 www.ppdm.go.id	PPD SPDM
 WhatsApp	Saluran & Email
 021-5200000	021-5200000000000000
 021-5200000	PPD SPDM
 021-5200000	021-5200000000000000

Gambar 4 Media Penyebaran Informasi Publik PPD SPDM



Gambar 5 Ruang Tunggu Layanan PTRO SPOM dan Fasilitas Penunjang



Gambar 6 Ruang Layanan Informasi Publik PTRO SPOM

Ruang layanan informasi publik merupakan sarana yang disediakan oleh PTRO SPOM dan PTRO Poliklinik UH Klaten/Puskesmas 2PT di lingkungan SPOM untuk layanan informasi masyarakat terpadu. Ruang Layanan Informasi Publik PTRO SPOM berada di Gedung Klaten Indah 2, Jl. Remaja Raya Nomor 23.

Jakarta Pusat. Sedangkan pada PPD Puskas, secara umum layanan disediakan dengan identitas dan pemetaan informasi publik melalui layanan tetap maka, seluruh PPD Puskas Unit Puskas Tesis saat memiliki ruang layanan informasi publik, baik secara khusus maupun bersama dengan layanan publik lainnya dalam ruang layanan terpadu. Ruang layanan yang terpadu dilengkapi dengan fasilitas komunikasi, serta meja dan kursi layanan. Ruang unit PPD Puskas Unit Kelya Pusat yang belum dapat menyediakan informasi resmi, namun tetap melakukan layanan informasi dengan menggunakan ruang layanan informasi publik PPD SPOM.



Gambar 7 Ruang Layanan Informasi Publik di PPD Puskas

Untuk mempersiapkan akses masyarakat terhadap layanan informasi publik SPOM, PPD SPOM juga mengoptimalkan perangkat teknologi informasi dan komunikasi dengan menyediakan akses PPD SPOM Terpadu dan PPD SPOM Mobile Terpadu sebagai alternatif media penyampaian informasi publik. Pada tahun PPD SPOM dan PPD SPOM Mobile terpadu baru telah PPD yang memiliki PPD SPOM dengan PPD Puskas Unit Kelya Pusat dan PPD Puskas Unit Puskas Tesis di seluruh Indonesia. Pemohon informasi publik dapat langsung meminta informasi publik yang dikuasai oleh PPD Puskas

lingkungan SPOM. Dengan demikian, Pelajar Penerima Informasi publik PPO Publikasi dapat mengungkap informasi publik dan memperoleh informasi publik. Hal ini merupakan salah satu bentuk kultural PPO SPOM dengan melalui PPO Publikasi di lingkungan SPOM untuk mengabdikan kepada masyarakat.



Figure 3. SWGM PRO DPMN Network

Untuk pemetaan informasi publik disediakan akses jam kerja PPD SPOM. Pemetaan layanan informasi publik dilaksanakan pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.00 sesuai zona waktu lokal PPD (POM dan PPD). Pemetaan di lingkungan Sektor POM. Pemetaan informasi publik & lain jam layanan akan diberikan pada hari kerja berikutnya. Pemetaan layanan informasi publik PPD di lingkungan SPOM dituangkan dengan aplikasi Sistem Pemetaan Layanan (SAPL). Melalui aplikasi SAPL, pemaparan pemetaan informasi publik dapat mencakup: implementasi/pemetaan pemetaan informasi publik serta memuat formulir pemetaan informasi publik, formulir pemetaan formulir, tanggapan formulir, formulir ketidaktanggapan, Surat Keputusan PPD tentang Pengajuan Informasi, dan formulir lainnya.



Gambar 4 Aplikasi Sistem Pemetaan Layanan (SAPL)

Berkas/lebar: PPD.17 ayat 15) Persatuan Kerja informatik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sektor Layanan Informasi Publik. Sektor Publik juga menyediakan semua dan memastikan pemetaan informasi publik dengan memperhatikan stabilitas, bag penyederhanaan kualitas. PPD SPOM akan menyediakan semua dan memastikan layanan informasi publik melalui dan dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat. Dengan menyediakan fasilitas bag kelompok masyarakat serta, serta layanan masyarakat dengan kualitas sesuai, baik di tingkat PPD SPOM, maupun PPD-Pelayanan Unit Kerja. Pada saat PPD SPOM juga mengimplementasikan stabilitas layanan informasi publik bag penyederhanaan kualitas. SPOM akan memberikan Surat Keputusan Utama SPOM Nomor (K.01.02.01.01.01.01 Tahun 2020 tentang Pengaturan Aspek/lebar Penyederhanaan Kualitas Informasi).



Area 16a: Ramping entrance



Area 16b: Restroom stall area



Area 16c: Outdoor Primary Location



Area 16d: Outdoor Primary Location

Appendix 16 Limited Access Preopening Checklist page PPT 89/90



Gambar 11 Fasilitas Ruang Perpustakaan dan PTK Pelaksana



Screenshot 12 File Berikan Ruang untuk Penguji Disiplin Berbasis CGO-UECO
Pada Website SPOL, Subsite PPO SPOL dan Subsite PPO Penguji B.
Lingkungan SPOL



Screenshot 13 Tangkapan Layar dari Jendela Sistem logat pada Video Informasi Laporan
PPTI untuk Meninjau Penguji Tindakan Rongga dan Tindakan Ruang

8. Media Penyediaan Informasi

SPOM (Sistem Pengolahan dan Penyaluran Informasi) adalah sistem yang menyediakan Data dan Materi dalam berbagai bentuk publikasi, baik melalui cetak.

1. Pustaka digital, website, pdf, video SPOM <https://www.spom.go.id>
audio, PPO SPOM <https://pod.spom.go.id/>, e-400000000 SPOM <https://pustaka.spom.go.id/>, buku pdf, foto dan pdf pelayanan buku <https://book.pom.go.id/pom-book-website/>

2. Publikasi melalui media sosial, yaitu:

- Facebook @spom official <https://www.facebook.com/spom.official>
- Instagram @spom.id <https://www.instagram.com/spom.id>
- Twitter @spomid <https://www.instagram.com/Twitter/SPOMID/SPOMID/>
- X @spom_id https://twitter.com/SPOM_ID
- X @spomidpon <https://x.com/spomidpon>
- Youtube @spom.official https://www.youtube.com/channel/UC0000m_3HvOrTnQzG4b-A
- Media sosial lain juga Riset dan LPT SPOM

3. Penyaluran berbagai media penyediaan informasi publik baik konvensional maupun digital yang dimiliki SPOM diantaranya

- Majalah POK
- Aplikasi SPOM mobile @ play store <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spomid.id>
- Aplikasi PPO SPOM mobile @ play store <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spomid.id>
- Aplikasi SPOM e-Perpustakaan Publik OTAK @ play store <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spomid.id>
- Aplikasi SPOM e-Perpustakaan Publik.kom @ play store <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spomid.id>
- Leaflet
- Banner
- E-book
- Video wall
- Videocon
- Media lainnya

4. K3000001 atau aplikasi dengan informasi mengenai produk EPDM dengan melibatkan Sektor Publik lain dengan Komisi Informasi Publik, Sektor Publik lain, akademisi, praktisi ahli, Asosiasi pelaku usaha/profesi, pelaku usaha, masyarakat dan komunitas, dan Governmental Organization (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta media massa.



Gambar 14 Kumpulan Informasi massa- W60000 EPDM, G60400 ITIG EPDM



Gambar 15 Desain Aplikasi EPDM sebagai Media Publikasi Informasi



Gambar 16 Kiborasi EPDM dengan Sektor Publik Lainnya dalam Penguatan Informasi

C. Sumber Daya Manusia (SDM)



Gambar 17 Profil Pendidikan Sumber Daya Manusia PRD SPOM

Komponen SPOM juga memberikan informasi publik, untuk supaya terpublikasi dengan menjadikan sumber daya manusia yang kompeten dengan jumlah yang banyak. Pada tahun 2023, PRD SPOM bekerja dengan SDM sebanyak 28 orang. Adapun latar belakang pendidikan SDM yaitu sarjana (60%), Asisten (34%), Magister (20%), dan D3 (6%).

Pengelolaan pengetahuan informasi di lingkungan SPOM juga didukung dengan SDM yang tergolong dalam Rantai-Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada salah satu PRD Pendidikan dan Rantai Pendidikan dan Rantai Tumbuh di lingkungan SPOM.

D. Anggaran

Anggaran pengelolaan informasi dan dokumentasi pada PRD SPOM dalam rangka implementasi kontribusi informasi publik pada tahun 2022 sebesar Rp. 16.773.000.000,- yang terdiri dari:

1. Anggaran perjalanan dinas keastasi SDM pengelola PRD: Rp. 100.000.000,-
2. Anggaran pembelian komputer, laptop, perangkat informasi dan dokumentasi: Rp. 1.320.071.000,-
3. Anggaran pengoperasian sistem sistem informasi publik Rp. 8.344.207.000,-

Berikut anggaran sebagai berikut:

Tabel 1. Alokasi Anggaran Pengabdian Intelektual dan Dokumentasi dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik pada PPD BPOK Tahun 2004

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN PENDAPATAN (Rp. -)
1	ANGGARAN RUMAH PENGOLAHAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI PUBLIK	200.473.000
1	Ruang pendataan dan kearsifan dalam rangka pengolahan dokumentasi dan informasi publik	87.380.000
2	Pembelengkapan Ruang (Sustetnal) Tahun PPD di Lingkungan BPOK	10.240.000
3	Monevung dan Teknik Keterbukaan Informasi Publik Internal di Lingkungan BPOK dan Dinas	100.500.000
4	Ruang kearsifan PPD BPOK dengan Ruang Publik ter, Ruang Informasi Publik dan Ruang akses layanan	42.844.000
5	Pembelengkapan perantara dan Informasi Publik dan Ketersediaan Informasi yang Berwujud	44.229.000
2	ANGGARAN PENINGKATAN KOMPETENSI PETUSAK HINDI DIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	1.000.273.000
1	Pusat Pelayanan Publik dan Budaya Pelayanan Dinas termasuk Peningkatan Layanan Informasi Publik	118.240.000
2	Workshop Peningkatan Informasi Publik dan Peningkatan Masyarakat (Jalur Peningkatan Layanan PPD, Peningkatan Masyarakat dan KID)	429.280.000
3	Konsep dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik termasuk Layanan Informasi Publik	118.121.000
4	Workshop Informasi, Komunikasi, dan Kehumasan	2.000.000.000
5	Berbagai Teknik Peningkatan Tindakan Kerja Melalui Transferensi Digital Sektor PDI sebagai bagian dari Program PPD dalam Dokumentasi dan Arsip	1.004.718.000

NO	KUAS KEGIATAN	Jumlah Anggaran (Rp. -)
4	ANGGARAN PENGEMBANGAN FASILITAS LAYARAN SIPONBIS PUBLIS	1.844.791.000
1	Operasional layanan Pengujian dan Informas termasuk Layanan Informas Publik (PIP) SIPON	33.000.000
2	Pemetaan Saluran Pemancar dan Pabrik Informas Layanan Informas dan Pengujian termasuk Layanan Informas Publik (PIP) dan Pemantauan Saluran Informasi PIP2 untuk memastikan tanggapnya sistem informas	90.000.000
3	Sewa Ruang Pesta Ruang di Gedung Pemukiman Publik	50.000.000
4	Pengadaan Riset dan sebagai media informas publik di area terapan publik SIPON	800.000.000
5	Pengadaan Media Digital (Pengadaan VIDEOCAM I Riset, dan Televisi) sebagai media informas publik di area terapan publik SIPON	2.400.000.000
6	Pemetaan Gedung dan Rencanan Tangga Darurat pada Gedung Adhara sebagai Gedung Pemukiman Publik Satu Blok SIPON termasuk di antaranya terdapat Ruang Layanan Informas Publik	1.214.400.000
7	Sewa lahan publik dan pemukiman lahan publik sebagai fasilitas bagi pelayanan publik	1.800.000.000
TOTAL		10.799.201.000

Selain itu, pada masing-masing PPG Telekomunikasi Unit Kerja Pusat dan LRT (PGCM) di seluruh Indonesia juga dilaksanakan kegiatan untuk pengabdian masyarakat dan dokumentasi dalam rangka memastikan keterbukaan informas publik.

BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

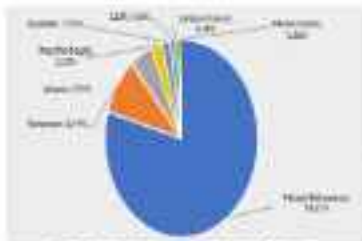
4. Layanan Informasi Publik (PIP) di Lingkungan SPOM

a. Jenis Layanan Informasi Publik

Pada tahun 2024, Pusat Rengas Informasi dan Dokumentasi (PRID) di lingkungan SPOM yang terdiri dari ITD SPOM dan ITD Pemasaran Liris Rengas Pasut dan Liris Paspasera. Tahun SPOM di seluruh Indonesia telah menerima 172 permohonan informasi dari provinsi dengan profil sebagai berikut: DKI (28,47%), Sumatera (9,41%), PABTIRPur (3,50%), Sulawesi (1,70%), LAM (2,19%), Yogyakarta (3,50%), Kepulauan (3,50%), dan independent serta lainnya (8,11%).



Grafik 1 Statistik jumlah Permohonan Informasi Publik Tahun 2024



Grafik 2 Profil Permohonan Informasi Publik Tahun 2024

Tidak yang diteliti adalah:

- Daftar produk dan perusahaan Oot dan Makanan yang terdaftar di BPOM
- Data lengkap dan akurat terkait daftar dan Volume Produk Oot di Indonesia dan semua volume (GPA) 13
- Data dan informasi tentang penggunaan produk
- Data dan informasi tentang regulasi dan prosedur impor makanan
- Data hasil pengujian. Data dan laporan tahun 2024
- Data hasil pengujian produk pangan
- Data nasional mengenai tahun 2023
- Data dan hasil uji mikrobiologi yang mengungkap hasil uji tahun 2024
- Data penelitian tentang penggunaan produk pangan yang terdaftar yang memerlukan tindakan farmasi dan obat tradisional tanpa izin edar
- Data penggunaan obat-obat tradisional dan suplemen kesehatan
- Data penggunaan Obat dan Makanan ilegal
- Informasi tentang pelaksanaan produk pangan yang baik
- Informasi terkait pangan kesehatan yang mengandung zat berbahaya di Indonesia dan ketersediaan pemerintah
- Sistem untuk menangani BPOM
- Sistem untuk peran BPOM dalam melindungi konsumen produk Obat dan Makanan
- Mengetahui produk obat yang mengandung obat palsu, obat palsu, dan obat palsu obat asli dan palsu BPOM dalam penanganan pemerintah
- Penjelasan informasi terkait metode sampling produk makanan, pangan dan pangan, pangan, obat, makanan, sampling produk makanan, serta untuk mengetahui prosedur dan metode sampling produk makanan
- Penjelasan wawancara tentang pelaksanaan program ini dan pangan aman
- Produk pangan yang terdaftar pada yang telah ada
- Daftar dan dokumen laporan, laporan hasil Pengujian Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Sedimen Farmasi dan Pangan Obat

Dengan target pemrosesan informasi sebagai berikut:



Grafik 3 Target Pemrosesan Informasi Publik Tahun 2023

3. Waktu yang Diberikan untuk Menyelesaikan Pemrosesan Informasi Publik

Pada tahun 2023, dari 170 pemrosesan informasi yang diberikan memiliki rata-rata jangka waktu penyelesaian pelayanan publik 3,64 hari kerja (HK). Sebanyak 157 (92,35%) pemrosesan informasi dapat diselesaikan dalam waktu 1-12 HK, (51) (30%) pemrosesan informasi dapat diselesaikan dalam waktu lebih dari 10-17 HK, dan total ada pemrosesan informasi yang tidak selesai melebihi 17 HK, jangka waktu penyelesaian pelayanan pemrosesan informasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang lama 17 HK. Dengan demikian, pemerintah jangka waktu penyelesaian pelayanan pemrosesan informasi publik ke 17 HK & tingkatan SPKM mencapai 100%.



Grafik 4 Rata Rata Waktu Penyelesaian Pelayanan Pemrosesan Informasi Publik Tahun 2023

2. Jumlah Informasi Internal Publik yang Diakuisisi dari OJK

Pada tahun 2021, sebanyak 170 permintaan informasi publik telah diselesaikan, meliputi 148 (85,29%) permintaan informasi publik melalui aplikasi, 12 (7,06%) permintaan informasi yang diterbitkan sebagai, dan 10 (5,65%) permintaan informasi yang diikhtisarkan. Permintaan informasi yang diterima sebagai dan diikhtisarkan termasuk informasi yang tidak dikuasai dan termasuk ke dalam KAPKasi Informasi yang Diakuisikan berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

3. Jumlah Pengajuan Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Jumlah pengajuan keberatan

Pada tahun 2021, terdapat 2 (dua) pengajuan keberatan atas informasi publik ke dalam PRO SPOM atas permintaan informasi ke PRO SPOM, yaitu mengenai:

- a. Data dan dokumen resmi lain atau data atau data lain yang diperoleh melalui Proaktif SPOM Sistem, termasuk data di mana pemohon yang telah disediakan, data formatnya dan berdasar analisis risiko manfaat negatif;
- b. Salinan lain (data atau data lain yang diperoleh melalui sistem Proaktif SPOM) yang sedang dan pernah digunakan di Internet. Termasuk semua informasi seperti **Notepad** untuk semua informasi dan informasi Proaktif untuk sistem, data dan dokumen resmi lainnya seperti informasi data di mana, pemohon yang telah disediakan, data formatnya dan berdasar analisis risiko manfaat negatif.

Kemudian PRO SPOM sudah memberikan tanggapan terhadap pengajuan keberatan tersebut dengan waktu penyelesaian 17 hari yang merupakan jangka waktu penyelesaian paling lama 30 hari kerja.

Jumlah Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pada tahun 2021 terdapat 2 (dua) pengajuan sengketa ke Komisi Informasi Pusat atas informasi publik SPOM mengenai:

- a. Data dan dokumen resmi lain atau data atau data lain yang diperoleh melalui Proaktif SPOM Sistem, termasuk data di mana pemohon yang telah disediakan, data formatnya dan berdasar analisis risiko manfaat negatif;
- b. Salinan lain (data atau data lain yang diperoleh melalui sistem Proaktif SPOM) yang sedang dan pernah digunakan di Internet. Termasuk semua informasi seperti **Notepad** untuk semua informasi dan informasi Proaktif untuk sistem, data dan dokumen resmi lainnya seperti informasi data di

atau, peneliti yang akan dilakukan, dan formulasi yang terakumulasi melalui data menjadi lengkap.

Order pengumpulan sampel PPO SPOM akan mengikuti urutan:

- a. Saling pemeriksaan awal tanggal 26 Agustus 2024
- b. Mutasi tanggal tanggal 17 September 2024
- c. Saling transfer tanggal 30 Desember 2024
- d. Saling transfer rekening awal 31 Desember 2024

PPO SPOM masih akan melalui proses penutupan sampel selanjutnya di tahun 2025.

Berkas laporan laporan pemrosesan informasi publik PPO SPOM tahun 2024 terdapat pada Lampiran 3.

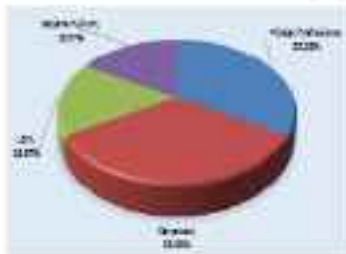
B. Sistem Informasi Publik PPO SPOM

1. Jumlah Pemrosesan Informasi Publik

Pada tahun 2024, PPO SPOM telah menerima 17 permohonan informasi dari pemohon dengan profil korporasi (35,29%), organisasi/lembaga (35,29%), (SIS) (17,65%), dan warga sipil (11,76%).



Grafik 3 Statistik Jumlah Pemrosesan Informasi Publik ke PPO SPOM Tahun 2024



Grafik 6 Rasio Penyebaran Informasi Publik ke FPD SPOM Tahun 2019

Data yang diterima antara lain:

- Produk atau jasa yang dijual atau ditawarkan yang tidak ada di pasar
- Data lengkap dan akurat tentang dan atau lokasi Pasar NPKV Sistem dan semua lokasi COVID-19
- Daftar produk dan perusahaan yang terlibat dalam SPOM
- Informasi tentang produk atau jasa yang mengandung unsur ilegal, palsu, atau tidak sesuai dengan standar
- Daftar nama produsen, pedagang, pembeli, dan pengguna barang dan jasa yang terlibat dalam SPOM

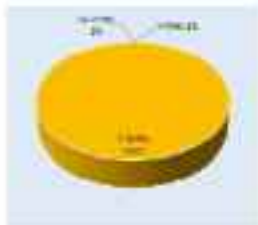
Berikut ini: rasio penyebaran informasi kepada publik



Grafik 7 Rasio Penyebaran Informasi Publik ke FPD SPOM Tahun 2019

2. Waktu yang diperlukan untuk Menyusun Perencanaan Informasi Publik

Pada tahun 2021, dari 8 permohonan informasi yang diajukan oleh PRD SPOM, memiliki rata-rata jangka waktu penyusunan pelayanan 440 hari kerja (HK). Seluruh permohonan informasi dapat diselesaikan dalam waktu 1-10 HK dan tidak ada permohonan informasi yang diselesaikan melebihi 17 HK. Jangka waktu penyusunan pelayanan permohonan informasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kemerdekaan Informasi Publik yang lama 17 HK. Dengan demikian, pemenuhan jangka waktu penyusunan pelayanan permohonan informasi publik ke PRD SPOM mencapai 100%.



Grafik 3 Perolehan Jangka Waktu Penyusunan Pelayanan Permintaan Informasi Publik ke PRD SPOM Tahun 2021

3. Jumlah Pembitaan Informasi Publik yang Dikembalikan dan Ditolak

Pada tahun 2021, sebanyak 8 permohonan informasi publik ke PRD SPOM yang ditolak, meliputi 4 (50,01%) permohonan informasi ditolak sepenuhnya, 1 (12,51%) permohonan informasi yang ditolak sebagian, dan 3 (37,51%) permohonan informasi yang ditolak. Pemenuhan informasi yang dikembalikan sebagai data tidak diproduksi karena alasan informasi yang tidak dikembalikan termasuk ke dalam Kriteria Informasi yang Dapat Dikembalikan berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kemerdekaan Informasi Publik.

4. Jaminan Pengawasan Ketersediaan dan Penyediaan Informasi Publik

Jaminan pengawas ketersediaan

Terdapat tahun 2024, terdapat 1 studi pengawas ketersediaan dan informasi publik ke Akademi PRPD SPOM dan penyediaan informasi ke PRPD SPOM yaitu sebagai berikut:

- a. Data dan dokumen terkait penelitian dan atau atau lain pengawas dan atau lain Publik (PVI) Sektoral, termasuk data pribadi, penelitian yang telah dilakukan, data formatif lainnya dan termasuk analisis nilai manfaat lainnya.
- b. Salinan atau (atau atau atau lain Pengawasan Terbatas) semua Vaksin COVID-19 yang sedang dan pernah digunakan di Indonesia. Termasuk semua laporan aspek RCT M&A untuk semua penelitian dan informasi Publik untuk pasien, data dan dokumen terkait semua aspek informasi data di klinik, penelitian yang telah dilakukan, data formatif lainnya dan termasuk analisis nilai manfaat lainnya.

Akademi PRPD SPOM sudah memberikan tanggapan terhadap pengawas ketersediaan tersebut.

Jaminan Penyediaan Informasi Publik

Terdapat tahun 2024, terdapat 1 studi pengawas penyediaan ke Forum Informasi Publik dan informasi publik SPOM sebagai berikut:

- a. Data dan dokumen terkait penelitian dan atau atau lain pengawas dan atau lain Publik (PVI) Sektoral, termasuk data pribadi, penelitian yang telah dilakukan, data formatif lainnya dan termasuk analisis nilai manfaat lainnya.
- b. Salinan atau (atau atau atau lain pengawas dan atau lain) semua Vaksin COVID-19 yang sedang dan pernah digunakan di Indonesia. Termasuk semua laporan aspek RCT M&A untuk semua penelitian dan informasi Publik untuk pasien, data dan dokumen terkait semua aspek informasi data di klinik, penelitian yang telah dilakukan, data formatif lainnya dan termasuk analisis nilai manfaat lainnya.

Salah satu pengawas informasi PRPD SPOM telah menerima sebagai berikut:

- a. Siting pemeriksaan awal tanggal 20 Agustus 2024
- b. Mekanisme tanggal tanggal 17 September 2024
- c. Siting lanjutan tanggal 22 September 2024
- d. Siting lanjutan lanjutan tanggal 10 Desember 2024

PRPD SPOM sudah akan menerima jawaban pertanyaan-pertanyaan tanggal berikutnya 4 tahun 2024

Ringkasan laporan layanan pemenuhan informasi publik PRPD SPOM tahun 2024 terdapat pada Lampiran 4

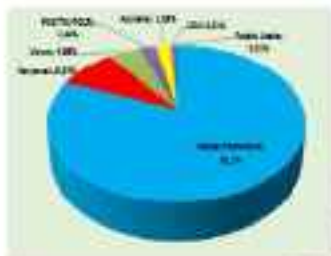
C. Layanan Informasi Publik (LIP) Pesisiran (SPCM)

1. Jumlah Pemrosesan Informasi Publik

Pada tahun 2024, PPD Pesisiran 2nd Stage Pesisir dan IPT SPCM telah menerima 184 permohonan informasi dari pemohon dengan profil sebagai berikut: (BT 1%), lingkungan (3,32%), kesehatan (4,89%), PANGSI/PIH (2,44%), umum (1,63%), LSM (0,81%), dan tidak ada (8,81%).



Grafik 9 Jumlah Jumlah Pemrosesan Informasi Publik ke PPD Pesisiran 2nd Stage Pesisir dan IPT SPCM Tahun 2024



Grafik 10 Rasio Pemrosesan Informasi Publik ke PPD Pesisiran 2nd Stage Pesisir dan IPT SPCM Tahun 2024

Data yang diminta meliputi:

- Data produk dan perusahaan Obat dan Makanan yang terdaftar di BPOM
- Data dan informasi tentang pengalasan merek
- Data dan informasi tentang regulasi dan prosedur impor makanan
- Data hasil penggunaan Obat dan Makanan tahun 2024
- Data hasil pengujian produk pangan
- Data bekalahan makanan tahun 2020-2023
- Data obat palsu dan obat kadaluarsa yang mengandung bahan kimia berbahaya tahun 2024
- Data penelitian tentang penetapan harga komoditas pangan, untuk pangan yang mendapatkan subsidi farmasi dan obat tradisional berupa izin edar
- Data pengalasan obat obat tradisional dan suplemen kesehatan
- Data pengalasan Obat dan Makanan ilegal
- Informasi tentang pelanggaran prosedur pangan yang baik
- Informasi terkait jaminan keamanan yang mengandung zat berbahaya di Surabaya dan sekitarnya pemerintah
- Informasi terkait manajemen BPOM
- Informasi terkait pasar BPOM dalam pandangan konsumen produk Obat dan Makanan
- Pergerakan moneter terkait metode sampling produk makanan, agar dan fungsi apoteker dalam pemantauan sampling produk makanan, serta kondisi operasional prosedur dalam melakukan sampling produk makanan
- Perhitungan keamanan tentang pelaksanaan program daya pangan aman

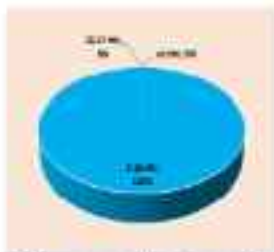
Sebagai bagian pemrosesan informasi, sebagai berikut:



Grafik 11. Jumlah Permintaan Informasi Publik ke RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

1. Waktu yang diperlukan untuk menerima permintaan informasi Publik

Pada tahun 2024, dari 194 permintaan informasi yang diajukan oleh DPRD Kabupaten Indragiri Riau dan LPT SPOM memiliki lamanya jangka waktu penyelesaian pelayanan yaitu 2,34 hari kerja (HK). Sebanyak 194 (100%) permintaan informasi dapat diselesaikan dalam waktu 1-10 HK, tidak ada permintaan informasi yang diselesaikan dalam waktu lebih dari 11-17 HK, dan tidak ada permintaan informasi yang diselesaikan melebihi 17 HK. Jangka waktu penyelesaian prosedur permohonan informasi publik termasuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik paling lama 17 HK. Dengan demikian, pemerintah jangka waktu penyelesaian pelayanan permohonan informasi publik ke DPRD di lingkungan SPOM mencapai 100%.



Grafik 10 Profil Pemenuhan Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan Pemintaan Informasi Publik ke DPRD Kabupaten SPOM Tahun 2024

1. Jenis Informasi Informasi Publik yang Ditanyakan dan Dijawab

Pada tahun 2024, sebanyak 194 permintaan informasi publik ke DPRD Kabupaten Indragiri, 142 (56.3%) permohonan informasi diketahui sepenuhnya, 11 (5.7%) permohonan informasi yang diketahui sebagian, dan 12 (1.3%) permohonan informasi yang ditolak. Permintaan informasi yang diketahui sebagian dan ditolak ke DPRD karena terdapat informasi yang tidak dapat diakses termasuk ke dalam kategori Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

4. Jumlah pengajuan dan tanggapan pengajuan informasi Publik

Jumlah pengajuan Kabupaten

Pada tahun 2024, tidak terdapat pengajuan informasi atau informasi publik ke. (Kecamatan) PPD SPJDN.

Jumlah Penyelesaian Berwujud Informasi Publik

Pada tahun 2024 tidak terdapat pengajuan berwujud ke forum informasi Publik atau layanan penyelesaian informasi publik ke PPD Kabupaten Jember Kota Raut dan UPT SPJDN.

Berikut ini laporan tahunan pemenuhan informasi publik PPD Kabupaten Jember Kota Raut dan UPT SPJDN tahun 2024 terdapat pada Lampiran 6.

Register Pemenuhan Informasi Publik dan Tingkat Kepuasan IPPI & Lingkungan SPJDN terdapat dalam website PPD SPJDN (<http://transparansi-41>) pada menu Laporan.



No	Jenis Laporan	Status	Tanggal
1	Laporan Tahunan 2023	Selesai	2024-01-01
2	Laporan Bulanan 2024	Selesai	2024-01-01
3	Laporan Bulanan 2024	Selesai	2024-01-01
4	Laporan Bulanan 2024	Selesai	2024-01-01
5	Laporan Bulanan 2024	Selesai	2024-01-01

Gambar 11 Screenshot Menu Register Pemenuhan Informasi pada Website IPPI SPJDN



No	Jenis Laporan	Status	Tanggal
1	Laporan Tahunan 2023	Selesai	2024-01-01
2	Laporan Bulanan 2024	Selesai	2024-01-01
3	Laporan Bulanan 2024	Selesai	2024-01-01
4	Laporan Bulanan 2024	Selesai	2024-01-01
5	Laporan Bulanan 2024	Selesai	2024-01-01

Gambar 12 Screenshot Menu Register Pemenuhan pada Website IPPI SPJDN

E. Pengamatan dan Pemantauan Internal PIRN di Sotro dan MADO (SPOM PIRN)

Terdapat 202K telah dilakukan pemantauan internal publik di SPOM
<http://pihn.com.id/pti/monitoring>.

1. Pemantauan Menu Kampanye Kegiatan
2. Pemantauan Menu Laporan berupa Laporan Layanan Informasi Publik Triwulan IV Tahun 2022 dan Triwulan I Tahun 2023
3. Pemantauan Informasi Secara Berkala
4. Pemantauan Informasi Secara Berkala untuk Sumber Informasi Masyarakat dan Warga Desa dan UPT serta secara berkala untuk UPT yang sudah ada UPT
5. Pemantauan Informasi Secara Berkala
6. Pemantauan Informasi Setiap Hari
7. Pemantauan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Internal Informasi Publik di Lingkungan SPOM tahun 2022
8. Pemantauan Laporan Tahunan PIRN tahun 2022
9. Pemantauan Menu Berita dengan berita aktual seperti kegiatan PIRN SPOM tahun 2022
10. Pemantauan Menu Laporan kinerja dengan Triwulan II
11. Pemantauan Menu MDO
12. Pemantauan Menu MADO
13. Pemantauan Statistik Layanan Informasi
14. Pemantauan Video Profil PIRN

Selain itu, telah dilakukan pemantauan internal publik di media sosial X dan Instagram PIRN SPOM dengan berfokus untuk meningkatkan kinerja.

1. Melakukan Himpun PIRN Negeri untuk Monitoring Masyarakat
2. Layanan Pemantauan Informasi Publik Triwulan IV Tahun 2022
3. MADO, Melakukan Masyarakat Secara Terpadu dengan Pemantauan Akses Internet
4. Kinerja Laporan Pemantauan, Pemantauan dan Pemantauan SP dan Dik di Lingkungan SPOM
5. Berkelanjutan PIRN SP, RI dan PIRN SPOM secara terpadu, Pemantauan Pemantauan Layanan Informasi Publik
6. Cara kerja akses prosedur dan prosedur dan prosedur di SPOM
7. Berkelanjutan PIRN SP, Kabupaten RI dan PIRN SPOM secara terpadu, Pemantauan Pemantauan Layanan Informasi Publik
8. Realisasi Laporan SPOM Tahun 2022
9. Jadwal Layanan Informasi Publik dan PIRN SPOM secara terpadu, 1415 II
10. Jadwal Pemantauan Laporan dan Layanan Informasi Publik dan Pemantauan Informasi yang Dihasilkan
11. Pemantauan Pemantauan Media Layanan PIRN SPOM
12. Jadwal dan Kinerja PIRN SPOM 2022

11. LAKSANA TERAPAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
12. Rapat Koordinasi Teknis (Rakoteknis) PRD SPOM Tahun 2024
13. Decentralizing PRD: Eastern Standardisasi Nasional (SDN) ke PRD SPOM
untuk meningkatkan Pengabdian Masyarakat Layanan Informasi Publik
14. Masalah Muka Dasi dan Masalah
15. Layanan Pemintaan Informasi Publik Tahunan I Tahun 2024
16. Forum Konsultasi Publik, Edukasi dan Awareness Keterbukaan Informasi
Publik di Giliwangi (Konsultasi Masyarakat di Giliwangi)
17. Edukasi Keterbukaan Informasi Publik di Giliwangi
18. TRIGUNAWATI Layanan Informasi Publik, IPD BANGUN PANGRAKAR
dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Decentralizing ke PRD SPOM
19. Laporan Keuangan SPOM Tahun 2023 (Auditing)
20. Laporan Kinerja SPOM 2023
21. Aspek Monev Internal KIP 2024, SPOM Selenggarakan Ethic Meeting
22. Layanan Pemintaan Informasi Publik Tahunan II Tahun 2024
23. Dokumen Perencanaan Kinerja SPOM Tahun 2023
24. LOKASI KOTA PADJARAN ANGGARAN (KIPK)
25. KEGIATAN ANGGARAN SPOM TAHUNAN 2024
26. PRD SPOM Melayan Layanan Informasi Publik Melalui WhatsApp: Pemusatan
Akasi Publik
27. Daftar Informasi Publik (DIP) SPOM Tahun 2024
28. PRD SPOM Berbagi Best Practice pada Taktik Keterbukaan Informasi
Publik Bekerja Penguasaan Keunggulan dan Penguasaan (SPKP)
29. Mengenal Dasar Pengantar Aman
30. Program Rindia SPOM Tahun Anggaran 2024
31. Mengenal Lebih Dekat: Program Prioritas SPOM untuk Masyarakat Pagar
32. Daftar HUKUM HUKUM TAHUN 2024
33. SPOM dan Masyarakat di Publik
34. Gelar Pameran dan Dokumentasi Peningkatan Model Keterbukaan
Informasi Publik
35. Keras PRD SPOM: Transparansi Informasi untuk Monev
36. SPOM baru pada Peningkatan di Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan
Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Kantor Informasi Publik
37. Layanan Pemintaan Informasi Publik Tahunan II Tahun 2023
38. Transparansi dasar konvensi SPOM
39. Pengabdian sosial dan masyarakat yang diberikan secara daring
40. Majalah Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan SPOM Tahun 2024
41. SPOM Peningkatan informasi dengan Riset Teknologi Pada Lembaga Layanan
Lembaga Pemerintah Non Kementerian



Center ID: 30000 / P-0 / 0100 sebagai Mekanisme Publikasi Program dan
Kegiatan RPTM

Bekerjasama dengan timel 10000 dan media sosial TPO SPQR, melakukan juga pengoptimalan dan penumbuhan informasi publik di **Youtube** dan media social Link Beye dan Link Pribadi. Tahap yang merupakan TPO Pribadi (SPQR).



Gambar 21 Media Sosial TPO Pribadi (SPQR) sebagai Media Publikasi/Pengumuman Informasi Publik

BAB IV KEGIATAN DAN CAPAIAN TAHUN 2024

4. Kegiatan FPO SPOM

Sepanjang tahun 2024, FPO SPOM telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagai bagian dari upaya meningkatkan penguatan kelembagaan informasi publik. Berikut ini adalah beberapa kegiatan:

1. Pendampingan FPO PMA untuk asistensi sebagai Peringkat Atas Implementasi Kelembagaan Informasi Publik di Lingkungan SPOM (Juni-Juli 2024)

FPO SPOM secara aktif mendukung penguatan sistem informasi publik di lingkungan SPOM sebagai bagian dari kegiatan rutin monitoring layanan informasi publik. Pendampingan ini dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik serta Peraturan SPOM Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan SPOM, meliputi:

- a. pendampingan dalam penguatan sistem pelayanan informasi publik melalui program kementerian atau informasi publik, dan
- b. pendampingan dalam penyusunan pendokumentasian dan pengoperasian publikasi informasi publik melalui **APLIKASI** media cetak dan media lainnya.



Gambar 20 Pendampingan Penguatan Kelembagaan Publik

Pendamping diberikan pelatihan dasar tentang prosedur filing ITD-BPM juga akan memberikan pendampingan dalam menulis komplain di WhatsApp Group serta online meeting. Kegiatan pendampingan juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) di lingkungan BPM. Di samping, ITD Pedukung UIN Karja Posed dan UPT BPM dapat mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di website lembaga serta menjadi media sosial resmi. Hal ini dapat berperan dalam meningkatkan BPM sebagai Badan Publik Informasi yang transparan, akurat, dan responsif dalam memenuhi hak publik sebagai nilai good governance.

Adapun beberapa pendampingan yang telah dilaksanakan sebagai berikut

Tabel 2 Pendampingan Pengawasan Informasi Publik Terhadap ITD-Pedukung

No.	Unit Kerja/PT yang Didampingi	Tempat/Waktu	Relais Pendamping
1	Laka POM di Kabupaten Bantul	Laka POM di Kabupaten Bantul/11 Mei 2024	1. Gus Darmawan 2. Teka Sawitjo 3. Dian Triani Alisa
2	Diseminasi Pemahaman Masyarakat dan Petaku Uraian Pengerjaan Online	BPTM/18 April 2024 dan 7 Agustus 2024	1. Fauziah Mawarningsih 2. Mita Nurcahi W 3. Mita Nurcahi W
3	Laka POM di Yaka	Laka POM di Kabupaten Yaka/7 Mei 2024	1. Yandi Kurnasari Luthi 2. Irena Mulya
4	Laka POM di Tanjung Bato	Laka POM di Kabupaten Taka/7 Mei 2024	1. Yandi Kurnasari Luthi 2. Irena Mulya
5	BPTM di Semarang	BPTM di Semarang/14 Juni 2024	1. Sima Andia 2. Fatmahanikah
6	Laka POM di Kabupaten	Laka POM di Kabupaten/10 Juni 2024	1. Fauziah Mawarningsih 2. Mita Nurcahi W 3. Mita Nurcahi W
7	Laka POM di Bantul	Laka POM di Kabupaten Bantul/9 Jul 2024	1. Andia Puspita-Rajaningrum 2. Selly Marlina 3. Dian Nur Rania

No.	Unit Kegiatan yang Dilatangi	Tempat/Waktu	Relasi/Pendamping
3	Desentral Pengawasan Produksi - Pengalokasian	SPGM 4 Jul 2024	1. Fauziah Masrumawati 2. Mita Yulia W 3. Shella Nurhasanah
4	Desentral Bina Out dan Mahasan	1000-1000 4 Cawetan Cikarang Bogor 11 Jul 2024	1. Fauziah Masrumawati 2. Mita Yulia W 3. Nita Vantagati
10	Desentral Pengawasan Produksi - Pengalokasian	Kota Mochron East Java, Jember 22 Jul 2024	1. Fauziah Masrumawati 2. Mita Yulia W 3. Shella Nurhasanah
11	Desentral Bina Out dan Mahasan	SPGM 24 Jul 2024	1. Yana Kusumawati 2. Irena Mita
12	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Out dan Mahasan - (PPGM PDM)	SPGM 22 Jul 2024	1. Uka Darmawan 2. Adha Fauzi Wicakanti 3. Sery Mariani 4. Dwi Nur Azzah
13	Inspeksi II	Aplikasi Zoom Meeting 22 Jul 2024	1. Adha Fauzi Wicakanti 2. Sery Mariani 3. Sery Mariani 4. Dwi Nur Azzah
14	Balai PDM di Jember	Aplikasi Zoom Meeting 25 Jul 2024	1. Adha Fauzi Wicakanti 2. Sery Mariani 3. Dwi Nur Azzah
15	SPGM 4 Bina Lamping	SPGM 4 Bina Lampung Agustus 2024	1. Sery Mariani 2. Anindya Aprilia Masaya
16	Balai PDM di Tangerang	Balai PDM di Tangerang 11 Desember 2024	1. Uka Darmawan 2. Dwi Nur Azzah 3. Mita Nurhasanah 4. Anindya Aprilia Masaya 5. Anindya Aprilia Masaya 6. Anindya Aprilia Masaya
17	Balai PDM di Bogor	Balai PDM di Bogor 01 Desember 2024	Mita Nurhasanah

Daftar pendamping yang dilatuki PPO SPGM antara PPO Pelaksana pada Tahun 2024 selengkapnya ada Lampiran 5.

2. **Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Informasi Lainnya yang Dikawatirkan**

PTD SPOM terus berupaya memantapkan sistem informasi untuk memastikan membuka dan menayangkan Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu. Hingga kini ada dua data yang tersedia dengan menggunakan Daftar Informasi Publik (DIP) Kegiatan Pemuktahiran DIP dan Klasifikasi Informasi yang (Memuatkan atau Tidak Informasi yang Dikawatirkan (DIK) pada tahun 2024) dilakukan dengan menerapkan sistem manajemen data.

a. **Sharing Sesi dan Penyajian Persepsi dalam Penyusunan DIP dan DIK di Lingkungan SPOM**

Kegiatan ini dilaksanakan secara daring pada Jumat, 2 Februari 2024, yang melibatkan Tim Paise Keterbukaan Informasi Publik, untuk memberikan pemahaman bagi Tim PTD SPOM terkait penyusunan DIP dan DIK sesuai dengan regulasi terkait.



Gambar 25. Sharing Sesi dan Penyajian Persepsi dalam Penyusunan DIP dan DIK di Lingkungan SPOM

b. **Desk Pemuktahiran Uraian Pemuktahiran DIP dan DIK di Lingkungan SPOM**

PTD menggelar **Desk Pemuktahiran Uraian** DIP dan DIK untuk menghasilkan draft uraian pemuktahiran DIP dan DIK tahun 2024 pada 21-23 Maret 2023. Uraian pemuktahiran DIP dan DIK tahun 2024 akan diupload dan akan PTD Penerima di lingkungan SPOM yang akan tahun 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk PTD Penerima di lingkungan SPOM untuk memantapkan penguasaan keterbukaan informasi publik serta menilai standar pengungkapan informasi sesuai ketentuan yang berlaku.



Gambar 24. Pertemuan Online Pemusatan DIF dan Dik di Lingkungan BPOB

a. Workshop Pemusatan dan Penetapan DIF dan Dik

Agenda Workshop Pemusatan dan Penetapan DIF dan Dik di lingkungan BPOB berlangsung secara hybrid yaitu daring melalui zoom meeting dan luring di Hotel Apetula, Jakarta Pusat, pada 3 Juni 2020. Workshop pembahasan dan penentuan persepsi terkait DIF dan Dik ini melibatkan seluruh Tim HRD BPOB dan Tim HRD Puskasari Unit Kerja Puskasari maupun Unit Puskasari Negeri di lingkungan BPOB dengan menghadirkan narasumber Paksi Puskasari Informasi Publik, Ahmad Harisjah Setiadi dari PT. Tera Gita Perseka, selaku workshop ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman seluruh Tim HRD BPOB dan Tim HRD Puskasari di lingkungan BPOB dan penyusunan DIF dan Dik serta meningkatkan koordinasi pengelolaan informasi publik di lingkungan BPOB. Dalam workshop ini juga dilakukan pengujian korektif terhadap informasi yang disediakan di lingkungan BPOB.



Gambar 25. Workshop Pemusatan dan Penetapan DIF dan Dik

C. RAPAT KOORDINASI TIM (MUSKAB) PPD EPDM

Pelaksanaan EPDM tahun 2024 berlangsung dari 20-25 April 2024. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, yaitu daring melalui zoom meeting dan luring di Aula Gedung Widyadarmas Tunggal (Aula EPDM). Pelaksana EPDM tahun 2024 yang dilaksanai langsung oleh PA. Kepala EPDM dan direktur perwakilan tinggi lainnya seperti tinggi provinsi, dan Kepala IPT di lingkungan EPDM, bertujuan untuk memfasilitasi koordinasi informasi publik. Keterbukaan informasi publik penting dalam praktik good and clean government, termasuk dalam pencapaian Ombudsman. Pada pelaksanaan ini, disampaikan materi dari narasumber yang telah berpengalaman dalam kegiatan terkait di lingkungan PPD di lingkungan EPDM. Materi tersebut adalah "Kultur Kerja Merancang Tantangan Keterbukaan Informasi Publik di Era Digital", yang disampaikan oleh narasumber Kepala Bkomsin Pusat, Nisa Hidayat Kalamangga, Hachim Agung Gazdra. Materi dilanjutkan dengan paparan yang disampaikan oleh Direktur Tata Kerja dan Koordinasi Kamunikasi Publik Kementerian Koordinator dan Informasi, Harjojo Gazdra dan diakhiri dengan **Sharing Mission** dan PPD membahas di sekitar EPDM untuk memfasilitasi peluang internal keterbukaan informasi publik di bidang pemerintahan dan dan materi untuk perbaikan kinerja informasi publik EPDM ke depannya.



Sumber: 25 Foto-foto PPD EPDM

4. Forum Kemitraan Publik, Ekstensi dan Pengembangan Substansi Informasi Publik di Bidang Obat dan Makanan di Provinsi Bengkulu

DRIM telah dengan penuh semangat melaksanakan banyak kegiatan yang berfokus untuk berkolaborasi dengan rangka memberikan dan menyebarkan akses akses terhadap Informasi di Bidang Obat dan Makanan, salah satunya melalui kegiatan Forum Kemitraan Publik, Ekstensi dan Pengembangan Substansi Informasi Publik di Bidang Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah Provinsi Bengkulu berkolaborasi dengan Komunitas Informasi Publik dan Kemitraan Informasi Provinsi Bengkulu. Kegiatan berlangsung di Hotel Serayu Bengkulu dan dilaksanakan pada 2007-2008 pada 20 Mei 2024, dengan metode *speed meeting* sebagai pertemuan satu-to-one dan Diskusi Publik melalui FGD yang akan diawali dan diakhiri dengan tradisi dari Masyarakat Informasi Publik 21 Mei. Sandhyasutra, Ph.D.), Wakil Ketua Kemitraan Informasi Provinsi Bengkulu (Maw. Anggoro, NPT, M.Eng.) dan Wakil Bupati POM di Bengkulu (Prof. Adnan-Nasrullah, S.M., Apt.).



Gambar 27 Kegiatan Forum Kemitraan Publik, Ekstensi dan Pengembangan Substansi Informasi Publik di Bidang Obat dan Makanan di Provinsi Bengkulu.

[illegible]

Para peserta dari berbagai perusahaan/organisasi di berbagai tempat telah berkesempatan untuk melihat langsung kegiatan, termasuk di dalam pameran, serta mengunjungi **alamat** perusahaan/ instansi publik di bidang CSR dan lainnya yang merupakan **komponen** utama dari kegiatan ini yang sangat menarik. Hal ini diharapkan akan terus menjadi agenda tetap (44).

8. J. S. Hwang & W. H. Chang, *Indonesian Journal of Physics*, **10**, 1 (2016).

Sebelum acara tersebut, Tim Pengabdian Masyarakat dengan fokus ini berkoordinasi, yaitu dengan SPOM Jawa, PPD Jawa, PPD Jawa Tengah, Register di Kabupaten Jawa Tengah di Semarang, dan juga Balai Desa yang akan menerima pada 14 Juli 2021. Register di Kabupaten Jawa Tengah memberikan informasi kepada masyarakat mengenai proyek SPOM di Semarang, serta melakukan pelatihan kepada masyarakat dan mahasiswa yang akan melakukan penelitian di lapangan.



Get the 28 Essential Factsheets
for free at www.mentalhealth.org.uk

2. Peningkatan Kinerja Kelembagaan Sistem Informasi Publik di Lingkungan BPKM

Pada tahun 2024, BPKM memperoleh suksesornya dalam penyelenggaraan pelaksanaan sistem informasi publik melalui Apatan Peningkatan Wawasan dan Budaya Kelembagaan Informasi Publik (Maret 2024) di lingkungan BPKM. Kegiatan tersebut oleh ISTPPD/Pusat Data dan Uji Keterbacaan, Satu-Satu BPKM, Balai PKM dan Loka PKM di seluruh Indonesia. Rangkaian kegiatan tersebut dimulai dengan **Self Assessment Good Governance (SAG)** pada 17 Juli – 18 Agustus 2024, diikuti dengan verifikasi dan uji keefektifan pada 18 hingga 31 Agustus 2024, peninjauan UPO pada 16 September – 10 Oktober 2024, dan kegiatan dengan presentasi dan wawancara di lapangan melalui portal informasi maupun sistem pada 29 – 31 Oktober 2024 di Kantor Utama, Kantor Pusat.

Pada 21 November 2024, PPO BPKM mengadakan **Self Meeting** untuk mengemukakan hasil Renc. SIP 2024. Selain akan berdiskusi, Sistem Manaj. BPKM selaku Renc. PPO BPKM memaparkan agenda terkait PPO Pelaksana yang telah menerima pedoman informasi dan standar yang akan berlaku untuk dapat meningkatkan kualitas layanan informasi publik. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh PPO Pelaksana untuk konsisten dalam melaksanakan pelaksanaan sistem informasi publik, sehingga masyarakat dapat lebih memperoleh informasi publik yang lebih akurat.



Gambar 38 Terpukul Peningkatan Wawasan Kelembagaan Informasi Publik di Lingkungan BPKM

Hasil Renc. SIP di lingkungan BPKM tahun 2024 menunjukkan pencapaian yang melampaikan dengan 81 dari 101 PPO Pelaksana (79,8%) telah selesai proses informasi, 10 PPO Pelaksana (10,4%) menerima proses untuk informasi, dan 3 PPO Pelaksana (3%) memperoleh proses untuk informasi. Peningkatan ini mencerminkan komitmen BPKM akan

kompetensi transparansi dan akuntabilitas informasi publik di tingkat Desa dan Kelurahan.

PTIG Kabupaten telah melaksanakan hasil Monev KIP sebagai dasar untuk peninjauan dan peningkatan hasil Evaluasi Nasional IPKRI 2020 yang dilaksanakan di Hotel Shree La Sarabhai pada 2 Desember 2020. Melalui Monev KIP ini, diharapkan Unit Kerja Rencan dan IPT Kabupaten Sukulana PDM mampu meningkatkan keterbukaan informasi publik di wilayah bawahan masing-masing sesuai kawasan, sehingga masyarakat umum dapat lebih mengakses informasi publik sesuai Desa dan Kelurahan.

E. Peningkatan dan Kemandirian AKSI IPKRI dalam kegiatan aksi informasi Publik dan Badan Publik lain

Sejak tahun 2020, IPKRI telah menjadi bagian integral dari pembangunan sistem berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Informasi Publik dan Badan Publik lainnya guna memperkuat sinergi antar berbagai dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Peningkatan aksi IPKRI dalam berbagai kegiatan telah berbagai kali dilaksanakan melalui hal yang bisa menjadi acuan pelaksanaan dan meningkatkan pelayanan informasi publik yang lebih baik dan hemat sehingga masyarakat. Kegiatan yang dilakukan IPKRI diantaranya, sebagai berikut:

a. Mengoptimalkan Penguasaan Informasi dari Masyarakat Publik

Pada Juli 2021, Distrik Tala Wala dan Kecamatan Sempukan Publik (DTWP) Kecamatan Kecamatan dan Informasi (Korinfo) menyelenggarakan Sosialisasi TALA (Tala) dengan tema "Penguasaan dan Penguasaan Informasi Publik melalui *Wala*". Acara ini berlangsung secara hybrid, tanggal 01 Juli 2021 di Sarung Sempukan Sempukan, Lantak serta secara online melalui *Zoom* dan *Whatsapp*. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran penguasaan informasi publik dan memperlakukan <https://www.youtube.com/watch?v=...> sebagai sarana penguasaan informasi secara masyarakat. Para peserta yang terdiri dari perwakilan IPKRI Kecamatan, Lembaga Swadaya, dan Pemerintah Desa, mendapatkan materi mengenai strategi pengumpulan informasi publik yang *Wala* dan *Wala*. Melalui Sosialisasi ini, diharapkan akan penguasaan informasi publik dapat lebih optimal dalam menyampaikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada masyarakat umum dengan prinsip keterbukaan informasi publik.



(Gambar 30) Memorable Dengan Tema Pengkajian Informasi dan Komunikasi Publik

2. Forum Koordinasi RPQ Komunikasi Publik Rencana Rantai UI KIP

Pada 12 Agustus 2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian mengadakan Forum Koordinasi RPQ dengan tema Komunikasi Publik Rencana Rantai Utang Utang Mener 14 Tahun 2024 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Acara ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara berbagai Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (Dinas Komunikasi dan Informatika di tingkat Indonesia). Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memperkuat status dan komitmen publik dalam rangka membangun nilai UI KIP, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. RPQ BPC adalah forum koordinasi dan kolaborasi antara UI KIP untuk memperkuat komitmen.



(Gambar 31) Memorable dan Potensi Forum Koordinasi (RPQ)

2. Launching Mener KIP Tahun 2024

Pada 4 September 2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian mengadakan Launching Mener Mener 14 Tahun 2024, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara berbagai Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (Dinas Komunikasi dan Informatika di tingkat Indonesia).

Kelompok ini menggolongkan Tjapen sebagai salah satu budaya yang bernilai sejarah. SAG Money XRP kepada SAG Sistem Rukh yang berkearifan, termasuk Kemerdekaan, Lambang Persewaan, dan Kemerdekaan, Lambang dan Struktur, Persewaan Persewaan, Sistem Utang, Misk, Hapala, Bujur, Persewaan Tinggi Hapala, dan Hapala Persewaan. Melalui kegiatan ini, diharapkan SAG Sistem Rukh dapat menjadi dan meningkatkan implementasi kebudayaan informasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kemerdekaan Informasi.



Copyright © 2014 Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). All rights reserved.

© Lajunthong 13441 Impaka, Kalampong, and Jorjoraka. August 2019.

Pada 17 Oktober 2024, Komite Informasi Publik (KIP) meluncurkan hasil kerja kolaborasi Komite Informasi Publik (KIP) 2021 di Hotel Ruben, Jakarta Barat, yang juga dibagikan melalui kanal YouTube Komite Informasi Publik. Acara ini menandai tahap awal dari proses penyusunan KIP yang meliputi sosialisasi, pengumpulan data dan kelompok KIP daerah, pengisian kuisioner dan wawancara KIP daerah, hasil Group Discussion, dan kegiatan Asesmen Sosial Forum. Setelah 100 peserta hadir secara langsung, termasuk perwakilan Komite Informasi Pusat, Pemerintah Daerah, dan Lintas Publik lainnya, KIP sebagai program prioritas nasional yang dilaksanakan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, berlabel untuk mempercepat implementasi kebijakan informasi publik di 34 provinsi dalam bentuk publik, hukum, dan ekonomi. Hasil KIP 2021 merupakan skema TLO yang mengintegrasikan aspek keberlanjutan dan memberikan pengakuan signifikan terhadap informasi publik standar baru melalui kolaborasi.



Gambar 33 Launching Hasil Karya Keterampilan Informasi Publik 2023

A. Berbagi Praktik Baik (Jen. Praktek Jaring: atau PPI) (SPJ)M

PPID SPJ/M terus berkomitmen dalam menanggulangi keterbatasan informasi publik dengan berbagi praktik baik kepada berbagai pihak. Melalui berbagai forum, seperti virtualisasi layanan digital, transparansi dalam penyediaan informasi, serta computer literasi yang terus meningkat dan penjangkauan kepedulian SPJ/M memberikan akses informasi yang lebih mudah, cepat dan akurat. Berbagi praktik baik yang dilakukan oleh PPID SPJ/M diantaranya yaitu:

a. Debuterang PPID DPR RI ke PPID SPGM

PPID SPGM menerima kunjungan dari PPID DPR RI sebagai Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada 5 Februari 2024 dalam rangka selamatan pengisian sistem informasi Publik di SPGM. PPID DPR RI bertemu dengan perwakilan legislasi RI untuk menjangkau penyebaran hukum informasi publik yang lebih baik di lingkungan DPR RI untuk berbagi informasi profesional Mayor RI dan Komisi Informasi Publik pada tahun 2024.



Gambar 34 Debuterang PPID DPR RI ke PPID SPGM

g. Bercheming PRD SP-15 Kesehatan ke PRD SPOM

PRD SPOM menerima kunjungan dari PRD Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) pada 15 Februari 2022 dalam rangka bercheming pengabdian layanan informasi Publik. PRD SP-15 mendiskusikan masalah kesehatan dalam pemerintahan. Setelah itu, PRD pengabdian pelayanan informasi publik dan PRD Fokustas dan membangun kemitraan untuk pengabdian dan ini juga dapat untuk penguatan kerja sama dengan pengabdian informasi publik.



Sumber: 15 Bercheming PRD SP-15 Kesehatan ke PRD SPOM

g. Bercheming PRD B-18 ke PRD SPOM

PRD SPOM menerima kunjungan dari PRD B-18 BONGORONG NONGORONG pada 7 Mei 2022 dalam rangka bercheming pengabdian layanan informasi Publik. PRD B-18 mendapat kemitraannya untuk mendiskusikan hasil bercheming di sana membangun pengabdian layanan informasi publik di lingkungan lokal.



Sumber: 18 Bercheming PRD B-18 ke PRD SPOM

2. RPO SPOM BAGI PUKD DAN DOK PERAN KEBERKATAN INFORMASI Publik – Literasi Transformasi Digital Keberkahan Informasi Publik untuk Indonesia Maju

Dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas Keberkahan Informasi Publik, Sari Indonesia menyelenggarakan Forum Kebekatan Informasi Publik dengan agenda pengujian, demonstrasi, sosialisasi dan sharing literasi Sektor Layanan Publik yang dilaksanakan di di Komplek Grand Sahaton, pada 27 Mei 2024.

Dalam kesempatan tersebut, Rapor SIP Hutan dan Organisme sebagai RPO SPOM, Rapor PUKD, menekankan bahwa keberkahan SPOM sebagai Badan RPO memiliki dukungan dari berbagai perusahaan layanan informasi publik.

SPOM terus melakukan berbagai inisiatif pengujian dalam mempromosikan keberkahan informasi melalui beragam aspek utama.



Gambar 27 Berbagi Pukid dan SIP Hutan dan Organisme sebagai RPO SPOM, Rapor PUKD, Sari Indonesia

3. Berkomunikasi RPO (Good to be RPO) (SPOM)



Gambar 28 Berkomunikasi RPO SPOM dan RPO SPOM

RPO SPOM memiliki dukungan dari RPO Badan Keberkahan dan Keluarga Berencana Nasional (KBK) pada 2 Juli 2024 untuk agenda sosialisasi pengujian layanan informasi publik di SPOM.

RPO SPOM mendukung melalui dalam upaya pengujian keberkahan informasi publik, melalui forum pengujian layanan informasi publik dan RPO KBK dan mendukung kegiatan pelatihan untuk jajaran Unit Kerja RPO maupun UPT SPOM dalam pengujian implementasi

kegiatan informasi publik. Selain itu, PPD BKKOM juga menyelenggarakan melalui laman jejaring informasi publik di website SPOM, website PPD BKKOM, dan website unit kerja Pusat dan LPT BKKOM.

f. PPD SPOM Berbagi dan Proses Pengambilan Keputusan Informasi Publik pada Rapat Koordinasi PPD APRIL 2021

PPD SPOM berbagi praktik terbaik atau best practice dalam pengelanaan, proses dan Monet OP, internal di lingkungan SPOM dalam Rapat Koordinasi Pengelanaan Keputusan Informasi Publik Antar Nasional Republik Indonesia (KARNAS) pada 22 Agustus di Hotel Hyatt, Century Park, Jakarta Barat. Acara ini dihadiri oleh 66 orang pakar dari berbagai yang terdiri dari internal Akrida dan perwakilan dari beberapa Badan Publik. Para peserta sempat amukun dalam berdiskusi terkait proses team pengelanaan informasi publik termasuk beberapa strategi apa-apa. PPD akan menerbitkan Badan Publik. Informasi penting lainnya, kategori Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian pada tahun 2020 yang telah Kaplan ini juga dihadiri oleh Komisioner Komisi Informasi Pusat.



Gambar 34 PPD SPOM Berbagi dan Proses Pengambilan Keputusan Informasi Publik pada Rapat Koordinasi PPD APRIL

3. FPD BPDH sebagai Unit Kerja Pusi Tindakan Keterbukaan Informasi Publik (TPK)

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menggelar Jelajah Keterbukaan Informasi Publik pada 16 September 2024. BPDH berpartisipasi aktif sebagai "Badan Penerima Pengawasan Keterbukaan Informasi Publik" dalam kegiatan tersebut. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat komitmen dan kolaborasi antar Badan Publik dalam meningkatkan akses keterbukaan informasi publik yang lebih baik dan transparan & responsif.



Gambar 46 Partisipasi BPDH pada TAJARAN Keterbukaan Informasi Publik BPDH

4. Saat Penerima Sertifikat Pengawasan Keterbukaan Informasi Publik (PPD BPDH) kepada (PPD) BPDH

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi serta memastikan ketersediaan akses informasi yang akurat dan terpercaya bagi masyarakat, Radio Republik Indonesia (RRI) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penerima Pengawasan Informasi dan Dokumentasi (PPD) (PPD) pada 20 September 2024. Kegiatan ini digelar secara daring dengan tag RRI akan memperkuat sistem keterbukaan informasi publik dan meningkatkan akuntabilitas layanan informasi.

Dalam acara tersebut, BPDH turut berkolaborasi dengan berbagai perusahaan dan praktisi terkait salah satu "Sertifikat Pengawasan Keterbukaan Informasi Publik," yang menyandi sebagai inisiatif dan budaya dalam membuka layanan informasi secara transparan, akurat, dan sesuai dengan standar yang berlaku.



Gambar 41 Inaugurasi FRI BRN ke FRI BRUM

Setelah proses awal dan forum tersebut, FRI BRN melaksanakan inaugurasi ke FRI BRUM pada 14 Oktober 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan transparansi serta mengoptimalkan proses kerja yang telah diterapkan FRI dalam pengelolaan informasi publik. Melalui kunjungan ini, FRI BRN memperoleh wawasan mengenai perkembangan sistem informasi FRI, mulai dari optimalisasi layanan digital, mekanisme pelayanan permohonan informasi, hingga strategi peningkatan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat komitmen kedua lembaga dalam menjalankan ketentuan informasi yang ada dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik.

B. Laporan FRI BRN

Pada tahun 2024, terdapat informasi nasional yang terdapat dalam dan di luar negeri yang disampaikan oleh FRI BRN dan BRUM.

1. Penerbitan Keputusan dan Keputusan Pengawasan Informasi Publik dalam rangka Pengawasan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BRN

Regulasi dan kebijakan yang terdapat dalam dan di luar FRI BRN dan BRUM:

- a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Pengawasan Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.01.04.05 Tahun 2024 tentang Pengawasan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- b. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor HK.02.00.22-02.04.05 Tahun 2024.

lingkup data informasi publik di lingkungan Badan Pengkaji Obat dan Makanan.

1. Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi: Badan Pengkaji Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2018.0474 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Informasi yang di Keluarkan di Lingkungan Badan Pengkaji Obat dan Makanan.
2. Buku Standar Operasional Prosedur, yaitu:
 - 1) POM-05.02.0PM.01.00P-01 Pemrosesan Informasi Publik
 - 2) POM-05.02.0PM.01.00P-04 Pengajuan Informasi Publik
 - 3) POM-05.02.0PM.01.00P-05 Pengajuan Informasi Publik
 - 4) POM-05.02.0PM.01.00P-06 Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik
 - 5) POM-05.02.0PM.01.00P-07 Pengajuan Konsumsi
 - 6) POM-05.02.0PM.01.00P-08 Pendokumentasian Informasi Publik
 - 7) POM-05.02.0PM.01.00P-09 Aktualisasi Pelayanan Informasi Publik

2. Melakukan SIMP atau Pemrosesan Monitoring dan Evaluasi keterbukaan Informasi Publik yang diorganisasikan oleh Kantor Informasi Publik

Badan Pengkaji Obat dan Makanan melakukan proses pemrosesan pemantauan keterbukaan informasi publik yang sesuai dengan cara menggunakan data Rasio Informasi Publik. Mekanisme dilakukan untuk mengukur kepatuhan, tingkat kepatuhan, serta mengidentifikasi implementasi Badan Publik dalam keterbukaan informasi publik. Analisis dilakukan terhadap pengajuan OAD dan pemrosesan up publik. Terdapat 6 indikator pemantauan kepatuhan yaitu: 1) Rasio dari Nomor RP yaitu indikator 1), Mengumpulkan informasi publik (bobot penilaian 25%); 2) Menyediakan Database Informasi Publik (bobot penilaian 15%); 3) Pengantaraan Website (bobot penilaian 15%); 4) Keterbukaan Daftar penilaian 15%); dan 5) Pengajuan Rasio dan Jasa (bobot penilaian 20%); Pemrosesan yang dilakukan untuk informasi tahap yaitu:

1. Pengajuan OAD yang berlangsung dari 4 Desember hingga 2 Oktober 2021 pada IT 02.02 sebagai dasar untuk SIMP.
2. Simulasi kepatuhan atau OAD dilakukan oleh pihak ketiga pada 7 - 26 Oktober 2021 (ditunda hingga 26 Oktober). Badan Publik dapat melaporkan hasil pemantauan dan memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan korektif yang diperlukan.
3. Proses evaluasi berlangsung pada 26 Oktober - 2 November 2021, yang bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan antara pemantauan pemantauan hasil pemantauan untuk tindakan korektif, laporan tahun ini dukungan yang baik dari Badan. Secara umum, hasil evaluasi pemantauan dilakukan pada 4 - 2 November 2021 untuk menghasilkan nilai akhir hasil pemantauan kepatuhan atau OAD.

3. **Profil dan Anggaran Biaya RENCANA (RAB) DOK**

SPOM juga membuat prestasi gemilang di ajang bergengsi **Anggaran Biaya RENCANA (RAB) DOK** yang diselenggarakan oleh **Forum Indonesia AHA** merupakan penghargaan yang diberikan kepada instansi pemerintah dan lembaga yang berprestasi dalam pelayanan informasi publik, serta pelayanan informasi yang inovatif. Dalam kesempatan ini, **PRD di lingkungan SPOM** kembali meraih penghargaan di berbagai kategori, yaitu:

1. **Gold Winner** **kategori** **Kecepatan Pelayanan Informasi Publik Terhadap Masyarakat**

dengan judul proposal: **Kecepatan Pelayanan Informasi Publik Terhadap Masyarakat**

2. **Gold Winner** **kategori** **PRD Terbaik, PRD**

dengan judul proposal: **PRD Terbaik**

3. **Bronze Winner** **kategori** **PRD Terbaik, PRD**

dengan judul proposal: **Kecepatan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Sistem Pengrusak**

4. **Bronze Winner** **kategori** **Kecepatan Pelayanan Informasi Publik Terhadap Masyarakat**

dengan judul proposal: **Kecepatan Pelayanan Informasi Publik Terhadap Masyarakat**

5. **Bronze Winner** **kategori** **Layanan Pelayanan Informasi Publik**

dengan judul proposal: **Layanan Pelayanan Informasi Publik PRD CACIL**



Gambar 3.1. Penyerahan Penghargaan pada Anggaran Biaya RENCANA DOK

Dengan pencapaian ini, **PRD SPOM** akan semakin memperkuat implementasi **transparansi informasi publik di lingkungan SPOM** dan memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia.

BAB V

KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kendala Internal

Salah satu hambatan layanan informasi publik, meliputi beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPI di lingkungan BPKM diantaranya:

1. Belum optimalnya pemahaman Pejabat Pelaksana Informasi Publik (PIP) Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT tentang keterbukaan informasi publik dan pengikhtisaran layanan informasi publik oleh PPII sebagaimana terdapat dalam Peraturan Presiden/Gubernur/Gubernur Daerah (Gubernur Provinsi) (GDP). Pemahaman yang belum optimal tersebut antara lain pada cara klasifikasi informasi publik, jenis layanan informasi yang termasuk ke dalam layanan PPII, cara cara pelayanan informasi publik oleh PPII, penanganan atau aliran pada layanan SIEM/PIID BPKM, terdapatnya format PPII yang digunakan, pelaksanaan aplikasi Sistem Pelayanan Layanan atau SIMPLI, pemetaan jangka waktu pelayanan. Penyebab belum optimalnya pemahaman tersebut, antara lain:
 - a. Adanya perbedaan atau perbedaan prosedur secara rutin di lingkungan BPKM sehingga SIEM/PIID BPKM belum maksimal diadopsi dan sebagai yang lebih banyak sebagai yang baru.
 - b. Kurang optimalnya sosialisasi atau sosialisasi hanya untuk pengikhtisaran layanan informasi publik yang dibuat oleh sebagai layanan informasi di lingkungan internal BPKM sehingga jika dibutuhkan secara daring.
2. Belum adanya pemahaman pegawai di Unit Kerja Pusat dan UPT sebagai unit publik informasi mengenai keterbukaan informasi publik, sehingga masih diperlukan SIEM/PIID mengenai keterbukaan informasi publik dan pendorongnya untuk internal untuk memahami pelayanan informasi publik ke PPII.
3. Pemahaman Pejabat Pelaksana Informasi Publik (PIP) Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT akan pemahaman Penguatan Ketersediaan atau klasifikasi informasi yang dilaksanakan di tingkat unit terapan masih belum optimal sehingga informasi yang disampaikan ke PPII BPKM akan pemeliharaan dan pemeliharaan klasifikasi informasi yang akan akan akan terbitan.
4. Sistematisasi hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di lingkungan BPKM tahun 2024 masih terdapat PPII Pelaksana yang belum optimal (SIEM/PIID Pelaksana masih informal dan SIEM/PIID Pelaksana sudah informal). Beberapa faktor yang menyebabkan yaitu masih adanya kurangnya komitmen dan pemahaman dalam pengikhtisaran layanan informasi publik.

8. Akses Internet

Dalam penelitian layanan Informasi Publik, APD di lingkungan BPM masih memerlukan beberapa kendala, antara lain:

1. Penelusur yang melakukan pencarian informasi publik belum semuanya memahami jenis informasi publik dan kualifikasi informasi yang disediakan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta jenis informasi publik yang diamanatkan APD dan kemampuannya dalam menggunakan Chat dan Mikrotik, sehingga masih terdapat pemetaan informasi publik yang tidak sesuai informasi yang diminta termasuk ke dalam klasifikasi informasi yang disediakan dan informasi tidak diamanatkan APD.
2. Terdapat unsur masyarakat/pemangku pemerintahan yang memahami Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dengan cukup akan tetapi lembaga pembuat keputusan serta institusi pemerintahan yang bertugas memberikan bantuan proses memperoleh akses pengungkapan informasi yang memadai atau memberikan bantuan di masyarakat.
3. Masih belum sepenuhnya tersedia akses internet terkait layanan informasi publik di tingkat RTD Pesisirsubak Ulu Kota Pesisirsubak LIT, sehingga belum banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan pemerintah informasi publik ke RTD Pesisirsubak.

BAB VI REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PILAYANAN INORMASI PUBLIK

Dengan informasi tentang internal dan eksternal dari pengetahuan layanan informasi publik tahun 2018, maka akan memperbarui dan capaian tahun 2023 serta memahami tentang masalah-masalah berdasarkan hasil Survei Nasional Masyarakat. SPOM perlu melakukan perbaikan secara berkesinambungan dengan melakukan selanjutnya tindak lanjut sebagai berikut:

K. Pengujian Kelengkapan dan Regulasi terkait Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan IPOM

1. Rencan kelengkapan terkait pengetahuan informasi publik sesuai perkembangan hukum dan anggaran.
2. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Kualitas Informasi yang Dihasilkan di Lingkungan IPOM secara berkala dengan menyelaraskan pelaksanaan Peraturan Kementerian sesuai ketentuan.
3. Rencan Standar Operasional Prosedur (SOP) Mekanisme, yaitu:
 - A) Standar Pemrosesan Informasi Publik,
 - B) Standar Pengajuan Eksternal,
 - C) Standar Pengumuman Informasi Publik,
 - D) Standar Pemutakhiran dan Pemeliharaan Daftar Informasi Publik,
 - E) Standar Pengujian Keterbukaan,
 - F) Standar Pemublikasian Informasi Publik, dan
 - G) Standar Mekanisme Pengawasan.
4. Pengujian kelengkapan dan regulasi di tingkat PPD Pelaksana Unit Kerja Pusat dan LPT IPOM melalui asyortasi SPOM2022 Kabupaten/Kota Unit Kerja Pusat dan Kepala Balai/Badan/Balai POM terentang Organisasi PPD Pelaksana di Lingkungan Unit Kerja Pusat/LPT dan SOP Mekanisme untuk pengetahuan informasi publik sesuai hasil rena terbaru yang dipublikasi oleh PPD Pelaksana.

L. Penguatan Kompetensi Sumber Daya Manusia

1. Penguatan keahlian dalam penyediaan pelayanan dan pengembangan informasi publik serta penguatan PPD Pelaksana Unit Kerja dan LPT secara berkala.
2. Penguatan kemampuan penguat pelayanan informasi PPD melalui forum konsultasi, bimbingan teknis, pelatihan, dan lain-lain, seminar, atau berinteraksi *two practice* ke Badan Publik lainnya terkait pengetahuan pelayanan informasi publik yang lebih baik.

1. Penguatan komitmen implementasi ketertarikan informasi publik secara berkesinambungan melalui Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Internal Ketertarikan Informasi Publik di lingkungan SPOM secara berkala/terencana

Hasil proses internal ketertarikan informasi publik di lingkungan SPOM meliputi: (1) PPD Penerimaan dan Harga Pokok dan PPD Pelayanan (JPT dan Jasa) dari POM ini menunjukkan; hasil: 1) 3) PPD Pelayanan (75,65%); mencapai profil informasi 2) 19 PPD Pelayanan (75,45%); mencapai profil terapan informasi 3) 3 PPD Pelayanan (5,77%); mencapai profil nilai informasi dan 4) Tindak lanjut yang menghasilkan profil terapan informasi dan nilai informasi. Capaian ini menunjukkan bahwa **energi** PPD Pelayanan dalam implementasi ketertarikan informasi publik sudah baik, namun perlu terus perbaikan bagi PPD SPOM untuk melakukan pengembangan internal seperti PPD Pelayanan yang belum informasi.

4. Optimalisasi Dukungan Teknologi Informasi dan Penguatan Pelayanan Informasi Publik

- a. Pengembangan suble PPD SPOM dan PPD SPOM melalui sistem teknologi
- b. Pengembangan aplikasi internal internal Ketertarikan Informasi Publik yang berbasis dengan **WISDA** (Sistem Informasi dan **WISDA** SPOM) dan **WISDA** (Sistem Informasi dan **WISDA** SPOM) untuk mempermudah proses monitoring dan evaluasi internal
- c. Peningkatan dan optimisasi **WISDA** SPOM dalam perkembangan informasi publik terapan terapan terapan terapan dan **WISDA** SPOM

5. Koordinasi dan Penguatan PPD SPOM melalui PPD Pelayanan secara berkesinambungan dalam pelayanan dan peningkatan informasi publik

6. Penguatan publikasi dan komunikasi terkait ketertarikan informasi publik, pelayanan informasi publik, dan layanan SPOM melalui berbagai media termasuk melibatkan pers/lembaga publik secara cepat dan tepat serta **WISDA** Chat dan **WISDA** yang berbanding di media sosial

7. Optimalisasi layanan informasi publik melalui penguatan implementasi Peraturan SPOM Nomor 01 Tahun 2011 tentang standar layanan informasi publik di lingkungan SPOM dan **WISDA** secara berkala, peningkatan terapan nilai pelayanan informasi publik, serta peningkatan secara prasarana **WISDA** aksesibilitas bagi penyandang disabilitas

8. Penguatan nilai dan peningkatan kualitas dan penyediaan pelayanan, dan penyediaan publikasi/pengumuman informasi publik dengan tujuan lebih luas agar masyarakat dapat memperoleh akses informasi publik yang cepat dan mudah

LAMPIRAN 1 DAFTAR PENINGKATAN KOMPETENSI SDM
PRO EPDM TAHUN 2024

LAMPIRAN I
DAFTAR PEMBESKATAN KOMPETENSI SEMESTER IV SEMESTER I TAHUN 2024

No	Judul Tema Kegiatan Belajar Materi dan Submateri (Kategori) Kategori	Tanggal Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Uraian Kegiatan
37	Kelembutan Berjalan, ds	Zoom Meeting	1 Juli 2024	PRISMA PUM
38	Kelembutan Berjalan, ds	Zoom Meeting	18 Juli 2024	PRISMA PUM
39	Kelembutan Berjalan dan Penguatan Jalan Berjalan dan Penguatan	Zoom Meeting	17 Juli 2024	Wid. Rukun dan Penguatan
40	Kelembutan Berjalan dan Penguatan Jalan Berjalan dan Penguatan Jalan Berjalan dan Penguatan Jalan Berjalan dan Penguatan	Zoom Meeting	18 Juli 2024	Magistrat Kategori Kategori
41	Kelembutan Berjalan dan Penguatan Jalan Berjalan dan Penguatan Jalan Berjalan dan Penguatan	Zoom Meeting	18 Juli 2024	Magistrat Kategori Kategori
42	Kelembutan Berjalan dan Penguatan Jalan Berjalan dan Penguatan Jalan Berjalan dan Penguatan	Zoom Meeting	18 Juli 2024	Magistrat Kategori Kategori
43	Kelembutan Berjalan dan Penguatan Jalan Berjalan dan Penguatan Jalan Berjalan dan Penguatan	Zoom Meeting	18 Juli 2024	Magistrat Kategori Kategori
44	Kelembutan Berjalan dan Penguatan Jalan Berjalan dan Penguatan Jalan Berjalan dan Penguatan	Zoom Meeting	18 Juli 2024	Magistrat Kategori Kategori
45	Kelembutan Berjalan dan Penguatan Jalan Berjalan dan Penguatan Jalan Berjalan dan Penguatan	Zoom Meeting	18 Juli 2024	Magistrat Kategori Kategori
46	Kelembutan Berjalan dan Penguatan Jalan Berjalan dan Penguatan Jalan Berjalan dan Penguatan	Zoom Meeting	18 Juli 2024	Magistrat Kategori Kategori
47	Kelembutan Berjalan dan Penguatan Jalan Berjalan dan Penguatan Jalan Berjalan dan Penguatan	Zoom Meeting	18 Juli 2024	Magistrat Kategori Kategori
48	Kelembutan Berjalan dan Penguatan Jalan Berjalan dan Penguatan Jalan Berjalan dan Penguatan	Zoom Meeting	18 Juli 2024	Magistrat Kategori Kategori

LAMPIRAN 2 INFOGRAFIS LAYANAN PPD TAHUN 2024



LAMPIRAN 3 LAPORAN SINGKAT LAYANAN PERMINTAAN
INFORMASI PUBLIK PPD DI LINGKUNGAN UPOM
TAHUN 2024

**(LUPULIN SIKRET) : LUPULIN PERMITILIN INFORMASI PUBLIK PRO-DU
LENGKAPAN DPOB
RABUL 2021**



REPUBLIC OF INDONESIA
Ministry of Agriculture

Ministry of Agriculture, Republic of Indonesia

NO	NAME	PERMIT	PERMIT	PERMIT	PERMIT	PERMIT	PERMIT
1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10



REPUBLIC OF INDONESIA
Ministry of Agriculture

Ministry of Agriculture, Republic of Indonesia

NO	NAME	PERMIT	PERMIT	PERMIT	PERMIT	PERMIT	PERMIT
1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10



100% ORIGINAL
CERTIFICATE

Ministry of Agriculture, Republic of Indonesia

LAMPIRAN 4 LAPORAN SINGKAT LAYANAN PERMINTAAN
INFORMASI PUBLIK PPID RPDM TAHUN 2024

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110



© 2000 Blackwell Science Ltd
Journal of Internal Medicine 247: 391–396

Copyright © 2007 John Wiley & Sons, Ltd.

Year	Country	Population (millions)	Urban population (millions)	Urban population (%)	Population growth (millions)	Population growth (%)	Population growth (millions)	Population growth (%)
1950	USA	150	75	50	10	6.7	10	6.7
1960	USA	160	80	50	15	9.4	15	9.4
1970	USA	170	85	50	20	11.8	20	11.8
1980	USA	180	90	50	25	13.9	25	13.9
1990	USA	190	95	50	30	15.8	30	15.8
2000	USA	200	100	50	35	17.5	35	17.5
2010	USA	210	105	50	40	19.0	40	19.0
2020	USA	220	110	50	45	20.5	45	20.5
2030	USA	230	115	50	50	22.2	50	22.2
2040	USA	240	120	50	55	23.3	55	23.3
2050	USA	250	125	50	60	24.4	60	24.4

[illegible]

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 395–401

Date		Particulars		Debit		Credit		Balance	
				Rs.	Paise	Rs.	Paise	Rs.	Paise
2019	1	By Balance b/d	100	00				100	00
	2	To Cash			50	00		50	00
	3	By Cash			20	00		70	00
	4	To Cash			30	00		100	00
	5	By Cash			10	00		90	00
	6	To Cash			10	00		100	00
	7	By Cash			20	00		80	00
	8	To Cash			20	00		100	00
	9	By Cash			10	00		90	00
	10	To Cash			10	00		100	00
	11	By Cash			20	00		80	00
	12	To Cash			20	00		100	00
	13	By Cash			10	00		90	00
	14	To Cash			10	00		100	00
	15	By Cash			20	00		80	00
	16	To Cash			20	00		100	00
	17	By Cash			10	00		90	00
	18	To Cash			10	00		100	00
	19	By Cash			20	00		80	00
	20	To Cash			20	00		100	00
	21	By Cash			10	00		90	00
	22	To Cash			10	00		100	00
	23	By Cash			20	00		80	00
	24	To Cash			20	00		100	00
	25	By Cash			10	00		90	00
	26	To Cash			10	00		100	00
	27	By Cash			20	00		80	00
	28	To Cash			20	00		100	00
	29	By Cash			10	00		90	00
	30	To Cash			10	00		100	00
	31	By Cash			20	00		80	00
	32	To Cash			20	00		100	00
	33	By Cash			10	00		90	00
	34	To Cash			10	00		100	00
	35	By Cash			20	00		80	00
	36	To Cash			20	00		100	00
	37	By Cash			10	00		90	00
	38	To Cash			10	00		100	00
	39	By Cash			20	00		80	00
	40	To Cash			20	00		100	00
	41	By Cash			10	00		90	00
	42	To Cash			10	00		100	00
	43	By Cash			20	00		80	00
	44	To Cash			20	00		100	00
	45	By Cash			10	00		90	00
	46	To Cash			10	00		100	00
	47	By Cash			20	00		80	00
	48	To Cash			20	00		100	00
	49	By Cash			10	00		90	00
	50	To Cash			10	00		100	00
	51	By Cash			20	00		80	00
	52	To Cash			20	00		100	00
	53	By Cash			10	00		90	00
	54	To Cash			10	00		100	00
	55	By Cash			20	00		80	00
	56	To Cash			20	00		100	00
	57	By Cash			10	00		90	00
	58	To Cash			10	00		100	00
	59	By Cash			20	00		80	00
	60	To Cash			20	00		100	00
	61	By Cash			10	00		90	00
	62	To Cash			10	00		100	00
	63	By Cash			20	00		80	00
	64	To Cash			20	00		100	00
	65	By Cash			10	00		90	00
	66	To Cash			10	00		100	00
	67	By Cash			20	00		80	00
	68	To Cash			20	00		100	00
	69	By Cash			10	00		90	00
	70	To Cash			10	00		100	00
	71	By Cash			20	00		80	00
	72	To Cash			20	00		100	00
	73	By Cash			10	00		90	00
	74	To Cash			10	00		100	00
	75	By Cash			20	00		80	00
	76	To Cash			20	00		100	00
	77	By Cash			10	00		90	00
	78	To Cash			10	00		100	00
	79	By Cash			20	00		80	00
	80	To Cash			20	00		100	00
	81	By Cash			10	00		90	00
	82	To Cash			10	00		100	00
	83	By Cash			20	00		80	00
	84	To Cash			20	00		100	00
	85	By Cash			10	00		90	00
	86	To Cash			10	00		100	00
	87	By Cash			20	00		80	00
	88	To Cash			20	00		100	00
	89	By Cash			10	00		90	00
	90	To Cash			10	00		100	00
	91	By Cash			20	00		80	00
	92	To Cash			20	00		100	00
	93	By Cash			10	00		90	00
	94	To Cash			10	00		100	00
	95	By Cash			20	00		80	00
	96	To Cash			20	00		100	00
	97	By Cash			10	00		90	00
	98	To Cash			10	00		100	00
	99	By Cash			20	00		80	00
	100	To Cash			20	00		100	00



1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

LAMPIRAN 5 LAPORAN SINGKAT LAYANAN PERMINTAAN
INFORMASI PUBLIK PPID PELAKSANA UNIT KERJA
PUSAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIK SIPM
TAHUN 2024

LAPORAN PENGUJIAN LAYANAN PEMENTAHAN INTERNALIS PUSAT KPD
PELAYANAN UNIT KERJA PUSAT DAN UNIT PELAYANAN TERPADU
TAMBAH



© 2000 Blackwell Science Ltd
Journal of Internal Medicine 247: 351–357

.....

[illegible][illegible]

Year	Age	Sex	Ethnicity	Prevalence (%)			Prevalence (95% CI)		
				Overall	Male	Female	Overall	Male	Female
2002-2003	15-44	M	White	1.2	1.1	1.3	0.8	0.7	1.4
2002-2003	15-44	F	White	1.1	1.0	1.2	0.7	0.6	1.3
2002-2003	15-44	M	Black	1.3	1.2	1.4	0.9	0.8	1.5
2002-2003	15-44	F	Black	1.2	1.1	1.3	0.8	0.7	1.4
2002-2003	15-44	M	Asian	1.1	1.0	1.2	0.7	0.6	1.3
2002-2003	15-44	F	Asian	1.0	0.9	1.1	0.6	0.5	1.2



LAMPIRAN 5 MATRIKS RINCIAN PENDAMPINGAN
PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK TERHADAP PPID
PELAKSANA DI UNIT KERJA PUSAT DAN UPT BPDN

Date	Description	Debit	Credit	Balance
1912	Jan 1			100.00
Feb 1	Jan 2	50.00		50.00
Mar 1	Jan 3	25.00		25.00
Apr 1	Jan 4	10.00		15.00
May 1	Jan 5	75.00		40.00
Jun 1	Jan 6	30.00		10.00
Jul 1	Jan 7	15.00		5.00



THE NEW YORK STATE OFFICE BUILDING, ALBANY



THE NEW YORK STATE OFFICE BUILDING, ALBANY



THE NEW YORK STATE OFFICE BUILDING, ALBANY



Date	Description	Amount	Balance	Remarks	Signature





The following table shows the results of the regression analysis for the dependent variable *Y* (in millions of dollars) against the independent variable *X* (in millions of dollars). The regression equation is $Y = 1.2X + 0.5$. The coefficient of determination is $R^2 = 0.85$.

<i>X</i> (millions of dollars)	<i>Y</i> (millions of dollars)
10	12.5
20	24.5
30	36.5
40	48.5
50	60.5
60	72.5
70	84.5
80	96.5
90	108.5
100	120.5

No.	Date	Particulars	Debit	Credit	Balance
1	1890	Jan 1			
2		Jan 2			
3		Jan 3			
4		Jan 4			
5		Jan 5			
6		Jan 6			
7		Jan 7			
8		Jan 8			
9		Jan 9			
10		Jan 10			
11		Jan 11			
12		Jan 12			
13		Jan 13			
14		Jan 14			
15		Jan 15			
16		Jan 16			
17		Jan 17			
18		Jan 18			
19		Jan 19			
20		Jan 20			
21		Jan 21			
22		Jan 22			
23		Jan 23			
24		Jan 24			
25		Jan 25			
26		Jan 26			
27		Jan 27			
28		Jan 28			
29		Jan 29			
30		Jan 30			
31		Jan 31			
32		Feb 1			
33		Feb 2			
34		Feb 3			
35		Feb 4			
36		Feb 5			
37		Feb 6			
38		Feb 7			
39		Feb 8			
40		Feb 9			
41		Feb 10			
42		Feb 11			
43		Feb 12			
44		Feb 13			
45		Feb 14			
46		Feb 15			
47		Feb 16			
48		Feb 17			
49		Feb 18			
50		Feb 19			
51		Feb 20			
52		Feb 21			
53		Feb 22			
54		Feb 23			
55		Feb 24			
56		Feb 25			
57		Feb 26			
58		Feb 27			
59		Feb 28			
60		Feb 29			
61		Mar 1			
62		Mar 2			
63		Mar 3			
64		Mar 4			
65		Mar 5			
66		Mar 6			
67		Mar 7			
68		Mar 8			
69		Mar 9			
70		Mar 10			
71		Mar 11			
72		Mar 12			
73		Mar 13			
74		Mar 14			
75		Mar 15			
76		Mar 16			
77		Mar 17			
78		Mar 18			
79		Mar 19			
80		Mar 20			
81		Mar 21			
82		Mar 22			
83		Mar 23			
84		Mar 24			
85		Mar 25			
86		Mar 26			
87		Mar 27			
88		Mar 28			
89		Mar 29			
90		Mar 30			
91		Mar 31			
92		Apr 1			
93		Apr 2			
94		Apr 3			
95		Apr 4			
96		Apr 5			
97		Apr 6			
98		Apr 7			
99		Apr 8			
100		Apr 9			
101		Apr 10			
102		Apr 11			
103		Apr 12			
104		Apr 13			
105		Apr 14			
106		Apr 15			
107		Apr 16			
108		Apr 17			
109		Apr 18			
110		Apr 19			
111		Apr 20			
112		Apr 21			
113		Apr 22			
114		Apr 23			
115		Apr 24			
116		Apr 25			
117		Apr 26			
118		Apr 27			
119		Apr 28			
120		Apr 29			
121		Apr 30			
122		May 1			
123		May 2			
124		May 3			
125		May 4			
126		May 5			
127		May 6			
128		May 7			
129		May 8			
130		May 9			
131		May 10			
132		May 11			
133		May 12			
134		May 13			
135		May 14			
136		May 15			
137		May 16			
138		May 17			
139		May 18			
140		May 19			
141		May 20			
142		May 21			
143		May 22			
144		May 23			
145		May 24			
146		May 25			
147		May 26			
148		May 27			
149		May 28			
150		May 29			
151		May 30			
152		May 31			
153		Jun 1			
154		Jun 2			
155		Jun 3			
156		Jun 4			
157		Jun 5			
158		Jun 6			
159		Jun 7			
160		Jun 8			
161		Jun 9			
162		Jun 10			
163		Jun 11			
164		Jun 12			
165		Jun 13			
166		Jun 14			
167		Jun 15			
168		Jun 16			
169		Jun 17			
170		Jun 18			
171		Jun 19			
172		Jun 20			
173		Jun 21			
174		Jun 22			
175		Jun 23			
176		Jun 24			
177		Jun 25			
178		Jun 26			
179		Jun 27			
180		Jun 28			
181		Jun 29			
182		Jun 30			
183		Jul 1			
184		Jul 2			
185		Jul 3			
186		Jul 4			
187		Jul 5			
188		Jul 6			
189		Jul 7			
190		Jul 8			
191		Jul 9			
192		Jul 10			
193		Jul 11			
194		Jul 12			
195		Jul 13			
196		Jul 14			
197		Jul 15			
198		Jul 16			
199		Jul 17			
200		Jul 18			
201		Jul 19			
202		Jul 20			
203		Jul 21			
204		Jul 22			
205		Jul 23			
206		Jul 24			
207		Jul 25			
208		Jul 26			
209		Jul 27			
210		Jul 28			
211		Jul 29			
212		Jul 30			
213		Jul 31			
214		Aug 1			
215		Aug 2			
216		Aug 3			
217		Aug 4			
218		Aug 5			
219		Aug 6			
220		Aug 7			
221		Aug 8			
222		Aug 9			
223		Aug 10			
224		Aug 11			
225		Aug 12			
226		Aug 13			
227		Aug 14			
228		Aug 15			
229		Aug 16			
230		Aug 17			
231		Aug 18			
232		Aug 19			
233		Aug 20			
234		Aug 21			
235		Aug 22			
236		Aug 23			
237		Aug 24			
238		Aug 25			
239		Aug 26			
240		Aug 27			
241		Aug 28			
242		Aug 29			
243		Aug 30			
244		Aug 31			
245		Sep 1			
246		Sep 2			
247		Sep 3			
248		Sep 4			
249		Sep 5			
250		Sep 6			
251		Sep 7			
252		Sep 8			
253		Sep 9			
254		Sep 10			
255		Sep 11			
256		Sep 12			
257		Sep 13			
258		Sep 14			
259		Sep 15			
260		Sep 16			
261		Sep 17			
262		Sep 18			
263		Sep 19			
264		Sep 20			
265		Sep 21			
266		Sep 22			
267		Sep 23			
268		Sep 24			
269		Sep 25			
270		Sep 26			
271		Sep 27			
272		Sep 28			
273		Sep 29			
274		Sep 30			
275		Oct 1			
276		Oct 2			
277		Oct 3			
278		Oct 4			
279		Oct 5			
280		Oct 6			
281		Oct 7			
282		Oct 8			
283		Oct 9			
284		Oct 10			
285		Oct 11			
286		Oct 12			
287		Oct 13			
288		Oct 14			
289		Oct 15			
290		Oct 16			
291		Oct 17			
292		Oct 18			
293		Oct 19			
294		Oct 20			
295		Oct 21			
296		Oct 22			
297		Oct 23			
298		Oct 24			
299		Oct 25			
300		Oct 26			
301		Oct 27			
302		Oct 28			
303		Oct 29			
304		Oct 30			
305		Oct 31			
306		Nov 1			
307		Nov 2			
308		Nov 3			
309		Nov 4			
310		Nov 5			
311		Nov 6			
312		Nov 7			
313		Nov 8			
314		Nov 9			
315		Nov 10			
316		Nov 11			
317		Nov 12			
318		Nov 13			



Date	Description	Amount	Balance	Total	Interest	Fees	Taxes	Other	Remarks
1/1/20	Opening Balance	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1/15/20	Deposit	50.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2/1/20	Withdrawal	25.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2/15/20	Deposit	75.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3/1/20	Withdrawal	30.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3/15/20	Deposit	60.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3/31/20	Closing Balance	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



[illegible]

No.	Name	Age	Sex	Occupation	Remarks
1	John Smith	35	Male	Farmer	Wife and 3 children
2	Mary Jones	42	Female	Homemaker	Husband deceased
3	Robert Brown	28	Male	Teacher	Single
4	Elizabeth White	55	Female	Retailer	Widow
5	James Wilson	30	Male	Blacksmith	Married
6	Sarah Davis	40	Female	Dressmaker	Single
7	Thomas Miller	25	Male	Student	Single
8	Anna Clark	38	Female	Nurse	Married
9	George Taylor	45	Male	Carpenter	Widow
10	Margaret Lewis	32	Female	Homemaker	Married
11	William Hall	50	Male	Farmer	Widow
12	Elizabeth King	48	Female	Teacher	Single
13	Richard Green	33	Male	Blacksmith	Married
14	Susan Adams	37	Female	Homemaker	Widow
15	Daniel Baker	29	Male	Student	Single
16	Mary Baker	41	Female	Homemaker	Married
17	John Baker	36	Male	Farmer	Widow
18	Elizabeth Baker	39	Female	Homemaker	Married
19	Thomas Baker	27	Male	Student	Single
20	Mary Baker	43	Female	Homemaker	Widow



Date	Time	Location	Remarks
10/10/2023	08:00	Kuala Lumpur	Arrived at airport, checked in, and boarded the plane.
10/10/2023	12:00	Singapore	Landed at Changi Airport, went through immigration and customs.
10/10/2023	15:00	Singapore	Checked into the hotel, took a shower, and had dinner.
10/10/2023	18:00	Singapore	Went for a walk in the park and enjoyed the view.
10/10/2023	21:00	Singapore	Had a late dinner at a restaurant and went to bed.
10/10/2023	24:00	Singapore	Left the hotel and went to the airport for the next flight.

No.	Name	Age	Description of Property	Value	Remarks
1	John Doe	45	House, 1000 sq ft, 2 bedrooms, 1 bathroom, lot 1/2 acre.	\$120,000	Owned since 1980.
2	Jane Smith	38	House, 1500 sq ft, 3 bedrooms, 2 bathrooms, lot 1/4 acre.	\$180,000	Owned since 1995.
3	Robert Johnson	52	House, 800 sq ft, 1 bedroom, 1 bathroom, lot 1/4 acre.	\$90,000	Owned since 1970.
4	Emily White	30	House, 1200 sq ft, 2 bedrooms, 1.5 bathrooms, lot 1/2 acre.	\$110,000	Owned since 2000.
5	Michael Brown	40	House, 1400 sq ft, 3 bedrooms, 2 bathrooms, lot 1/4 acre.	\$160,000	Owned since 1990.
6	Sarah Green	25	House, 900 sq ft, 1 bedroom, 1 bathroom, lot 1/4 acre.	\$80,000	Owned since 2005.
7	David Black	55	House, 1100 sq ft, 2 bedrooms, 1.5 bathrooms, lot 1/2 acre.	\$100,000	Owned since 1985.
8	Lisa Gray	35	House, 1300 sq ft, 2 bedrooms, 2 bathrooms, lot 1/4 acre.	\$130,000	Owned since 1998.
9	James Red	48	House, 1600 sq ft, 3 bedrooms, 2.5 bathrooms, lot 1/2 acre.	\$190,000	Owned since 1992.
10	Anna Blue	28	House, 1000 sq ft, 2 bedrooms, 1 bathroom, lot 1/4 acre.	\$105,000	Owned since 2002.

[illegible]





Item	Quantity	Unit	Price	Total
1. Cement	100	kg	1.20	120.00
2. Sand	200	m ³	0.50	100.00
3. Aggregate	150	m ³	0.80	120.00
4. Labour	10	man	10.00	100.00
5. Transport	1	km	5.00	5.00
6. Water	100	litre	0.01	1.00
7. Electricity	10	unit	0.10	1.00
8. Maintenance	1	hour	1.00	1.00
9. Insurance	1	year	1.00	1.00
10. Miscellaneous	1	unit	1.00	1.00
Total				450.00







Date		Description		Amount	
1900	Jan 1	Balance		100.00	
	Jan 15	Received from John Doe		50.00	
	Feb 1	Received from Jane Smith		25.00	
	Feb 15	Received from Mr. Brown		75.00	
	Mar 1	Received from Mrs. White		30.00	
	Mar 15	Received from Mr. Green		100.00	
	Apr 1	Received from Mr. Black		40.00	
	Apr 15	Received from Mr. Grey		60.00	
	May 1	Received from Mr. Blue		20.00	
	May 15	Received from Mr. Yellow		80.00	
	Jun 1	Received from Mr. Purple		15.00	
	Jun 15	Received from Mr. Pink		90.00	
	Jul 1	Received from Mr. Brown		35.00	
	Jul 15	Received from Mr. Green		55.00	
	Aug 1	Received from Mr. Black		10.00	
	Aug 15	Received from Mr. Grey		70.00	
	Sep 1	Received from Mr. Blue		25.00	
	Sep 15	Received from Mr. Yellow		65.00	
	Oct 1	Received from Mr. Purple		18.00	
	Oct 15	Received from Mr. Pink		82.00	
	Nov 1	Received from Mr. Brown		32.00	
	Nov 15	Received from Mr. Green		58.00	
	Dec 1	Received from Mr. Black		12.00	
	Dec 15	Received from Mr. Grey		68.00	
	Total			1000.00	

[illegible]

No.	Date	Description	Amount	Total
1	1890	To Balance	100.00	100.00
2	1891	By Cash	50.00	150.00
3	1892	By Cash	25.00	175.00
4	1893	By Cash	75.00	250.00
5	1894	By Cash	100.00	350.00
6	1895	By Cash	125.00	475.00
7	1896	By Cash	150.00	625.00
8	1897	By Cash	175.00	800.00
9	1898	By Cash	200.00	1000.00
10	1899	By Cash	225.00	1225.00
11	1900	By Cash	250.00	1475.00
12	1901	By Cash	275.00	1750.00
13	1902	By Cash	300.00	2050.00
14	1903	By Cash	325.00	2375.00
15	1904	By Cash	350.00	2725.00
16	1905	By Cash	375.00	3100.00
17	1906	By Cash	400.00	3500.00
18	1907	By Cash	425.00	3925.00
19	1908	By Cash	450.00	4375.00
20	1909	By Cash	475.00	4850.00

[illegible]



Date	Description	Debit	Credit	Balance
1890				
Jan 1	Balance forward			100.00
Jan 5	Wages	50.00		50.00
Jan 10	Materials	25.00		25.00
Jan 15	Repairs	10.00		15.00
Jan 20	Freight	5.00		10.00
Jan 25	Insurance	3.00		7.00
Jan 30	Interest	1.00		6.00
Feb 1	Balance forward			6.00
Feb 5	Wages	40.00		40.00
Feb 10	Materials	20.00		20.00
Feb 15	Repairs	10.00		10.00
Feb 20	Freight	5.00		5.00
Feb 25	Insurance	3.00		2.00
Feb 30	Interest	1.00		1.00
Mar 1	Balance forward			1.00
Mar 5	Wages	30.00		30.00
Mar 10	Materials	15.00		15.00
Mar 15	Repairs	8.00		7.00
Mar 20	Freight	4.00		3.00
Mar 25	Insurance	2.00		1.00
Mar 30	Interest	1.00		0.00
Apr 1	Balance forward			0.00
Apr 5	Wages	20.00		20.00
Apr 10	Materials	10.00		10.00
Apr 15	Repairs	5.00		5.00
Apr 20	Freight	3.00		2.00
Apr 25	Insurance	1.00		1.00
Apr 30	Interest	1.00		0.00
May 1	Balance forward			0.00
May 5	Wages	10.00		10.00
May 10	Materials	5.00		5.00
May 15	Repairs	2.00		3.00
May 20	Freight	1.00		2.00
May 25	Insurance	1.00		1.00
May 30	Interest	1.00		0.00
Jun 1	Balance forward			0.00
Jun 5	Wages	5.00		5.00
Jun 10	Materials	2.00		3.00
Jun 15	Repairs	1.00		2.00
Jun 20	Freight	1.00		1.00
Jun 25	Insurance	1.00		0.00
Jun 30	Interest	1.00		0.00
Jul 1	Balance forward			0.00
Jul 5	Wages	5.00		5.00
Jul 10	Materials	2.00		3.00
Jul 15	Repairs	1.00		2.00
Jul 20	Freight	1.00		1.00
Jul 25	Insurance	1.00		0.00
Jul 30	Interest	1.00		0.00
Aug 1	Balance forward			0.00
Aug 5	Wages	5.00		5.00
Aug 10	Materials	2.00		3.00
Aug 15	Repairs	1.00		2.00
Aug 20	Freight	1.00		1.00
Aug 25	Insurance	1.00		0.00
Aug 30	Interest	1.00		0.00
Sep 1	Balance forward			0.00
Sep 5	Wages	5.00		5.00
Sep 10	Materials	2.00		3.00
Sep 15	Repairs	1.00		2.00
Sep 20	Freight	1.00		1.00
Sep 25	Insurance	1.00		0.00
Sep 30	Interest	1.00		0.00
Oct 1	Balance forward			0.00
Oct 5	Wages	5.00		5.00
Oct 10	Materials	2.00		3.00
Oct 15	Repairs	1.00		2.00
Oct 20	Freight	1.00		1.00
Oct 25	Insurance	1.00		0.00
Oct 30	Interest	1.00		0.00
Nov 1	Balance forward			0.00
Nov 5	Wages	5.00		5.00
Nov 10	Materials	2.00		3.00
Nov 15	Repairs	1.00		2.00
Nov 20	Freight	1.00		1.00
Nov 25	Insurance	1.00		0.00
Nov 30	Interest	1.00		0.00
Dec 1	Balance forward			0.00
Dec 5	Wages	5.00		5.00
Dec 10	Materials	2.00		3.00
Dec 15	Repairs	1.00		2.00
Dec 20	Freight	1.00		1.00
Dec 25	Insurance	1.00		0.00
Dec 30	Interest	1.00		0.00
Total		1000.00	1000.00	0.00

Date		Description		Amount	
1900	Jan 1	Balance		100.00	
	Jan 15	Received from A. B.		50.00	
	Feb 1	Received from C. D.		25.00	
	Feb 15	Received from E. F.		75.00	
	Mar 1	Received from G. H.		100.00	
	Mar 15	Received from I. J.		50.00	
	Apr 1	Received from K. L.		25.00	
	Apr 15	Received from M. N.		75.00	
	May 1	Received from O. P.		100.00	
	May 15	Received from Q. R.		50.00	
	Jun 1	Received from S. T.		25.00	
	Jun 15	Received from U. V.		75.00	
	Jul 1	Received from W. X.		100.00	
	Jul 15	Received from Y. Z.		50.00	
	Aug 1	Received from A. B.		25.00	
	Aug 15	Received from C. D.		75.00	
	Sep 1	Received from E. F.		100.00	
	Sep 15	Received from G. H.		50.00	
	Oct 1	Received from I. J.		25.00	
	Oct 15	Received from K. L.		75.00	
	Nov 1	Received from M. N.		100.00	
	Nov 15	Received from O. P.		50.00	
	Dec 1	Received from Q. R.		25.00	
	Dec 15	Received from S. T.		75.00	
	Total			1000.00	





No.	Date	Description	Amount	Total
1	1/1/20	To Balance	100.00	100.00
2	1/15/20	By Cash	50.00	150.00
3	2/1/20	By Cash	25.00	175.00
4	2/15/20	By Cash	25.00	200.00
5	3/1/20	By Cash	25.00	225.00
6	3/15/20	By Cash	25.00	250.00
7	3/31/20	By Cash	25.00	275.00
8	4/1/20	By Cash	25.00	300.00
9	4/15/20	By Cash	25.00	325.00
10	4/30/20	By Cash	25.00	350.00
11	5/1/20	By Cash	25.00	375.00
12	5/15/20	By Cash	25.00	400.00
13	5/31/20	By Cash	25.00	425.00
14	6/1/20	By Cash	25.00	450.00
15	6/15/20	By Cash	25.00	475.00
16	6/30/20	By Cash	25.00	500.00
17	7/1/20	By Cash	25.00	525.00
18	7/15/20	By Cash	25.00	550.00
19	7/31/20	By Cash	25.00	575.00
20	8/1/20	By Cash	25.00	600.00



Date	Particulars	Debit	Credit	Balance
1890	Jan 1			100.00
Feb 1	To Cash	50.00		150.00
Mar 1	By Cash		25.00	175.00
Apr 1	To Cash	75.00		250.00
May 1	By Cash		100.00	350.00
Total		125.00	125.00	350.00



No.	Name	Address	Occupation	Remarks
1	John Doe	123 Main St, New York, NY	Teacher	Active
2	Jane Smith	456 Elm St, New York, NY	Nurse	Active
3	Robert Johnson	789 Oak St, New York, NY	Engineer	Active
4	Mary White	101 Pine St, New York, NY	Homemaker	Active
5	David Brown	202 Cedar St, New York, NY	Student	Active
6	Susan Green	303 Birch St, New York, NY	Teacher	Active
7	Michael Black	404 Spruce St, New York, NY	Engineer	Active
8	Emily Davis	505 Ash St, New York, NY	Homemaker	Active
9	James Wilson	606 Hickory St, New York, NY	Student	Active
10	Amanda Moore	707 Walnut St, New York, NY	Teacher	Active

[illegible]

LAMPIRAN 7 HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Survei Kepuasan Masyarakat

Layanan Informasi Publik Prabot
Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Tahun 2024



Pendahuluan

Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengumpulan data dan informasi untuk menilai kualitas layanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah. Survei ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan, serta untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dalam mengakses layanan publik. Survei ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah.

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu melalui kuesioner, wawancara, dan focus group discussion. Survei ini dilakukan secara berkala, yaitu setiap tahun sekali. Survei ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah.

Survei Kepuasan Masyarakat adalah salah satu cara untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah. Survei ini dilakukan secara berkala, yaitu setiap tahun sekali. Survei ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah.

Pengertian Survei

Survei adalah kegiatan pengumpulan data dan informasi untuk menilai kualitas layanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah. Survei ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan, serta untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dalam mengakses layanan publik. Survei ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah.



Keuntungan Survei

Survei Kepuasan Masyarakat memiliki beberapa keuntungan, yaitu: 1. Mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan. 2. Mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dalam mengakses layanan publik. 3. Meningkatkan kualitas layanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah.



Survei Kepuasan Masyarakat adalah salah satu cara untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah. Survei ini dilakukan secara berkala, yaitu setiap tahun sekali. Survei ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah.





- X @ppidbpom
- @ppidbpom
- ▶ PPID BPOM Mobile
- www.ppid.pom.go.id
- ppid@pom.go.id
- 0811-9410-533